



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu adanya pedoman pola klasifikasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pola klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
3. Arsip adalah rekaman suatu kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pengklasifikasian arsip dimaksudkan untuk memberikan acuan pada dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan metode menggolongkan naskah berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dengan menggunakan kode - kode.

Pasal 3

Tujuan pengklasifikasian arsip adalah agar dalam penataan dan penemuan kembali arsip dapat dilaksanakan secara mudah, cepat dan tepat.

BAB III
POLA KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pedoman pola klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan kelompok masalah, sub masalah dan sub- sub masalah.

- (2) pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kode-kode yang dipergunakan dalam bentuk bentuk angka.
- (3) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


IHWAN SUDRAJAT

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 71 Tahun 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

PEDOMAN KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

I. PENDAHULUAN

Tujuan kearsipan antara lain adalah menyediakan data dan informasi secepat - cepatnya kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pengendalian arsip yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang dikandung dalam arsip.

Salah satu sistem pengendalian dimaksud ialah mengklasifikasikan arsip yang artinya memisahkan arsip atas dasar perbedaan yang ada dan mengelompokkan atas dasar persamaan yang ada, yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif agar memudahkan penemuan kembali arsip sehingga pelayanan penyajian informasi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

II. BENTUK DAN SUSUNAN KODE KLASIFIKASI

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jepara.
2. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah dengan tiga perincian dasar yaitu perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga.
3. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

4. Untuk menentukan kode klasifikasi yang tepat, harus memahami masalah yang dikandung dalam surat, karena penemuan kembali surat tergantung pada ketepatan pemberian kode.
5. Surat yang mengandung lebih dari satu masalah maka harus lebih teliti dalam menentukan kode klasifikasi harus dipilih yang paling berat tekanannya dan harus diyakini kode tersebut memudahkan dalam penemuan kembali.
6. Arsip dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) pokok masalah, yang terdiri dari :

000 : UMUM

100 : PEMERINTAHAN

200 : POLITIK

300 : KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

400 : KESEJAHTERAAN RAKYAT

500 : PEREKONOMIAN

600 : PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

700 : PENGAWASAN

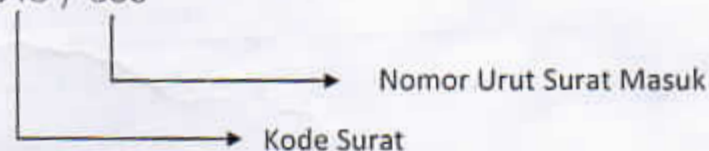
800 : KEPEGAWAIAN

900 : KEUANGAN

7. Cara penggunaan penulisan kode pada nomor surat masuk dan keluar diatur sebagai berikut :

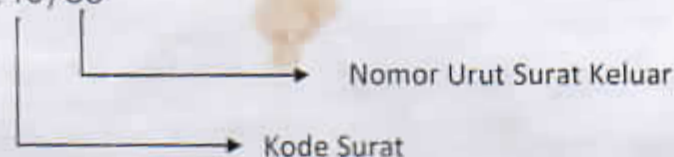
- a. Surat masuk :

Contoh : 045 / 635



- b. Surat keluar :

Contoh : 140/55



8. Pola Klasifikasi

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
002	Tanda kehormatan / penghargaan (khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
002.6	Monumen
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/ HUT (Hari jadi Provinsi/ Kab/ Kota)
004	Ucapan
004.1	Terimakasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon diri
004.4	Bela sungkawa
004.5	Ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lainnya
007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011	Gedung kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik

011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Bak
011.6	Hidrant
011.7	Alarm
011.8	Internet
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah Untuk Rumah Dinas
012.2	Perabotan
013	Akomodasi / Persinggahan (Mess/ Wisma/ Hotel)
014	Rumah susun / apartemen
015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop dll)
016	Telepon / Fax
017	Keamanan / ketertiban kantor
018	Kebersihan kantor
019	Protokol
019.1	Upacara bendera
019.2	Tata tempat (pemasangan gambar Pres/ Wapres)
019.3	Audiensi
019.4	Alamat-Alamat Kantor dan Pejabat
019.5	Penerima Tamu
019.6	Kerjasama
019.7	Umbul-umbul
020	PERALATAN
020.1	Standarisasi Harga
021	Alat Tulis Kantor
022	Mesin Kantor
022.1	Manual
022.2	Elektronik
023	Perabotan Kantor
024	Alat Angkutan

024.1	Orang
024.2	Barang
025	Pakaian Dinas
025.1	Distribusi Pakaian Dinas
025.2	Jadwal Pakaian Dinas
026	Senjata
027	Pengadaan Barang/Jasa (termasuk pengumuman pengadaan, penawaran, penunjukan, pelelangan)
027.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwijzing, negoisasi, evaluasi.
027.2	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
027.4	Serah terima pekerjaan
027.5	Pemeriksaan pekerjaan
027.6	Perpanjangan waktu / force majeure
027.7	Denda
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan barang / jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara / Daerah
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara / Daerah
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara / Daerah
029	-
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah dll)
033	Kendaraan Dinas
033.1	Pengurusan Kendaraan Dinas
033.2	Perawatan Kendaraan Dinas
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan dan Tanaman
036	Barang Persediaan Dalam Gudang
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Kantor/ Pabrik/Laboratorium

039	Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040	PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi / layanan
041.3.1	Keanggotaan
041.3.2	Peminjaman dan pengambilan
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.6.1	Bantuan buku, rak
041.7	Penghapusan / penyusutan bahan perpustakaan
041.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Surat Pengantar
045.2	Pola Klasifikasi
045.3	Akuisisi Arsip
045.4	Penyusutan Arsip
045.4.1	Jadwal Retensi Arsip
045.4.2	Penilaian Arsip
045.4.3	Pemindahan Arsip
045.4.4	Penyerahan Arsip
045.4.5	Pemusnahan Arsip
045.5	Pembinaan Kearsipan
045.5.1	Pengawasan
045.5.2	Bimbingan Kearsipan
045.5.3	Lomba Kearsipan
045.5.4	Pengkajian Kearsipan

045.6	Pemeliharaan, Pelestarian, / Konversasi Arsip
045.6.1	Fumigasi dan Termit Control
045.6.2	Depo Arsip
045.6.3	Restorasi
045.6.4	Alih Media
045.7	Layanan
045.8	Pemasyarakatan
045.8.1	Pameran
045.8.2	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.8.3	Sosialisasi Kearsipan
045.9	Pengembangan Sistem
045.9.1	Sistem Kearsipan
045.9.2	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
046	Sandi dan Telekomunikasi
047	Telepone, Telegram, Faximile, Telex, Radio, ISB
047.1	Kerusakan dan Perbaikan Jaringan Telekomunikasi
048	Data Elektronik
048.1	Jaringan LAN (<i>Local Area Network</i>)
048.2	Internet, Intranet
048.3	Email
048.4	Warnet
048.5	Hardware (Komputer, CPU, Monitor, dll)
048.6	<i>Software</i> (Perangkat Lunak)
048.7	Servise Komputer
049	Jaringan
050	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
050.1	Rencana Pembangunan Daerah
050.1.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
050.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
050.1.3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
050.1.4	Renstra SKPD
050.1.5	Musrenbang, Musrenbangcam, Musrenbangdes
050.2	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)

050.4	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
050.5	Laporan
050.5.1	Laporan Berkala
050.5.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)
051	Bidang Pemerintahan dan Politik
051.1	Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan di bidang : Hukum, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Idiologi dan Politik, Aparatur, Informasi dan Komunikasi dan Pertanahan
051.2	Bidang Politik
052	Bidang Penelitian dan Pembangunan
052.1	Penelitian dan Pengembangan Data di Bidang Pelayanan Umum, Penelitian Pembangunan Daerah, Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan
052.2	Pengumpulan, Penyajian dan Pengolahan Data Pembangunan Daerah dan Penyusunan Statistik Daerah
053	Bidang Kesejahteraan Rakyat Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Pendidikan, Sosial Budaya, Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Olahraga dan Kesenian serta Keagamaan
054	Bidang Perekonomian Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha
055	Bidang Pekerjaan Umum Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan serta Pertambangan dan Energi
056	Bidang Pengawasan Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Pengawasan Pemerintah dan Aparatur, Pembangunan dan Perekonomian, Keuangan dan Kekayaan Daerah
057	Bidang Kepegawaian Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Perencanaan Formasi, Perencanaan Jabatan, Penghargaan dan Tanda Jasa, Pengangkatan dan Kepangkatan, Pemindahan dan Peberhentian, Pensiun, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengolahan dan Pengujian Data
058	Bidang Keuangan Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Keuangan

059	Pengendalian Pembangunan
059.1	Pengendalian Pembangunan Fisik
059.2	Pengendalian Pembangunan Non Fisik
059.3	Laporan Evaluasi/ Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
061	Organisasi
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.1.1	Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi semi pemerintah BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel
065.2.1	Stempel Jabatan
065.2.2	Stempel Dinas
065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
066	Tata Hubungan Kerja
066.1	Telaah Tata Hubungan
066.2	Penyusunan
066.3	Bimbingan
067	Sistem dan Prosedur
067.1	Telaahan
067.2	Penyusunan
067.3	Bimbingan
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
068.1	Pemantauan Pelaksanaan
068.2	Sistem Prosedur Kerja
068.3	Evaluasi Pelaksanaan Sistem
068.4	Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Analisis Beban Kerja

069.2	Evaluasi Jabatan / Lembaga
069.3	Uraian Jabatan
069.4	Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Survey
073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / diskusi / <i>Forum Group Discussion (FGD)</i>
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	lokakarya
073.6	Diseminasi / sosialisasi hasil penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Studi Kelayakan
076	Studi Kasus
077	-
078	-
079	-
080	KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
085	International di dalam negeri
086	International di luar negeri
087	-
088	-

089	-
090	PERJALANAN DINAS
090.1	Surat Tugas/ Perintah
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I dan II)
094	Perjalanan Pegawai termasuk pemanggilan pegawai
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	-
109	-
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
111.1	Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshuffle
113.2	Penunjukan Menteri ad Intern
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1

114	Kementrian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementrian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPR, DPD, MA, BPK,dll)
117	Lembaga Non Kementrian
118	Otonomi Desentralisasi (Otonomi Daerah)
119	Kerjasama antar Kementrian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.1	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.3	Monografi, tambahkan kode wilayah
120.4	Koordinasi
120.4.1	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.4.2	Instansi Vertikal
120.4.3	Kerjasama antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri
120.5	Instansi Tingkat Propinsi
120.5.1	Dinas Otonomi
121	Gubernur Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah Meliputi percalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan / Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan, sungai, gunung, pulau, selat dsb
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan

128	Swapraja
129	-
130	PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
130.1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
130.2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / Walikota (LKPJ)
130.3	Surat Teguran Bupati
130.4	Monografi
130.5	Koordinasi
130.6	Instansi Tingkat Propinsi
130.6.1	Satuan Kerja Perangkat Daerah (termasuk kunjungan kerja, study banding)
130.6.2	Instansi Vertikal
131	Bupati, meliputi percalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati, meliputi percalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah daerah, meliputi Muspida, Forkopinda
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran Wilayah
135.5	Permasalahan/ Perselisihan Daerah
135.5.1	Permasalahan Batas Wilayah
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
135.7	Pemberian dan Penggantian nama kota, daerah, jalan
135.8	Pembagian Wilayah
136	Pemberdayaan Masyarakat
136.1	Pemberdayaan Perempuan
136.2	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/ Pengarahan/ Amanat
138.2	Pembentukan Kecamatan

38.3	Pemekaran Kecamatan
38.4	Perluasan / perubahan batas wilayah Kecamatan
38.5	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
38.6	Laporan Kecamatan
39	Kerjasama antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
40	PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
41	Pemerintahan Desa, Kelurahan
41.1	Kepala Desa/ Petinggi, Lurah Meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
41.1.1	Biaya Pemilihan Kepala Desa/ Petinggi
41.2	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Desa, meliputi pembentukan keanggotaan kepengurusan dan kegiatannya
41.3	Perangkat Desa/ Kelurahan
41.3.1	Sekretaris Kelurahan, sekretaris desa/ Carik meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
41.3.2	Kepala Dusun, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
42	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
42.1	Aparatur (termasuk penghasilan pamong desa)
42.2	Anggaran Belanja Tambahan
42.3	Pendapatan Desa/ Kelurahan
42.3.1	Urusan Desa/ Kelurahan
42.3.2	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
42.3.3	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi
42.3.4	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
42.3.5	Penerimaan yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa/ kelurahan
42.3.6	Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa
42.3.7	Pendapatan Asli Desa (PADes)
42.3.8	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
42.4	Penerimaan Lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
42.5	Hasil dari Gotong Royong Masyarakat

143	Kekayaan Desa
143.1	Tanah Hak Pakai Desa
143.1.1	Tanah Bengkok
143.2	Tanah Titisara
143.3	Tanah Penganggonan
143.4	Tanah Desa Lainnya
143.5	Jalan Desa
143.6	Bangunan Desa
143.7	Ambulan Desa
144	Lembaga Tingkat Desa
144.1	Badan Permusyawarah Desa (BPD)
144.2	GAPOKTAN
144.2.1	Kelompok Tani
144.2.2	Rukun Tani
144.3	Dharma Tirta
144.4	LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
144.5	LMD (Lembaga Musyawarah Desa)
144.6	PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)
144.7	IPSM (Ikatan Paguyuban sosial Masyarakat)
144.8	Karang Taruna
144.9	BumDes
145	Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi, Peta Desa, Profil Desa
146	Kewilayahan
146.1	Pemekaran Desa/Kelurahan
146.2	Pembentukan Desa/Kelurahan
146.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan
146.4	Perubahan nama Desa/Kelurahan
146.5	Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa/Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa/Kelurahan
146.8	Asal-usul Desa
147	Rembug Desa
148	Pembangunan Desa/ Kelurahan

148.1	Pemberdayaan Masyarakat Kota
148.2	Perekonomian Desa/ Kelurahan
148.2.1	Usaha- Usaha Desa / Kelurahan
148.3	Prasarana Desa/ Kelurahan
148.3.1	Pemukiman kembali penduduk
148.3.2	Masyarakat Pra Desa
148.3.3	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
148.4	Pengembangan Desa/ Kelurahan
148.4.1	Tingkat Perkembangan Desa
148.4.2	Tata Desa
148.4.3	Perlombaan Desa/ Kelurahan
148.5	Koordinasi
148.5.1	Rakor Petinggi, Carik, Perangkat Desa Tk. Kecamatan
148.5.2	Rakor Petinggi, Carik, Perangkat Desa Tk. Kabupaten
148.5.3	Kerjasama Desa
149	RT- RW/ RK
150	LEGISLATIF MPR/DPR
151	KEANGGOTAAN MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.3.1	Recall
151.3.2	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Penggantian Antar Waktu
151.6	Mengundurkan Diri
152	Persidangan
153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan
154	Hak
155	KEANGGOTAAN DPR
155.1	Pencalonan

155.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
155.3	Pemberhentian
155.3.1	Recall
155.3.2	Meninggal
155.3.3	Mengundurkan Diri
155.4	Pelanggaran
155.5	Pergantian Antar Waktu
156	Persidangan
156.1	Sidang Pleno
156.2	Dengar Pendapat
156.3	Rapat Komisi
156.4	Reses
157	Kesejahteraan
157.1	Keuangan
157.2	Penghargaan
158	Kunjungan Kerja
159	Hak
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.4.1	Recall
161.4.2	Meninggal Dunia
161.4.3	Mengundurkan Diri
161.4.4	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.5.1	Pimpinan
161.5.2	Badan Musyawarah
161.5.3	Komisi
161.5.4	Badan Legislasi Daerah
161.5.5	Badan Anggaran

161.5.6	Badan Kehormatan
161.5.7	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-Rapat
162.1.1	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.1.2	Rapat pimpinan DPRD
162.1.3	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.1.4	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.1.5	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.1.6	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertib
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Propinsi
166	Pansus
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN/KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
171.3	Pelanggaran
171.4	Penggantian Antar Waktu (PAW)
171.4.1	Recall

171.4.2	Meninggal Dunia
171.4.3	Mengundurkan Diri
171.4.4	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.5.1	Pimpinan
171.5.2	Badan Musyawarah
171.5.3	Komisi
171.5.4	Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten (P2DK)
171.5.5	Badan Anggaran
171.5.6	Badan Kehormatan
171.5.7	Alat Kelengkapan lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-Rapat
172.1.1	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.1.2	Rapat Pimpinan DPRB
172.1.3	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.1.4	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.1.5	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.1.6	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi
172.3	Tata Tertib
172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kab/ Kota
176	-
177	-
178	-

179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.1.1	Dasar Negara
180.1.2	Undang Undang Dasar
180.2	Peraturan Perundang- Undangan
180.2.1	Tap MPR
180.2.2	Undang-Undang
180.2.3	Peraturan Pemerintah
180.2.4	Peraturan Presiden
180.2.5	Peraturan Daerah Propinsi
180.2.6	Peraturan Daerah Kabupaten
180.2.7	Peraturan Menteri
180.2.8	Peraturan Gubernur
180.2.9	Peraturan Bupati
180.2.10	Peraturan Desa
180.2.11	Peraturan Kepala Desa / Petinggi
180.3	Keputusan
180.3.1	Keputusan Presiden
180.3.2	Keputusan Menteri
180.3.3	Keputusan Lembaga Non Kementerian
180.3.4	Keputusan Gubernur
180.3.5	Keputusa Bupati
180.3.6	Keputusan Kepala Desa / Petinggi
180.4	Instruksi
180.4.1	Instruksi Presiden
180.4.2	Instruksi Menteri
180.4.3	Lembaga Non Kementerian
180.4.4	Instruksi Gubernur
180.4.5	Instruksi Bupati
180.4.6	Instruksi Kepala Desa / Petinggi
180.5	Kajian Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan
180.6	Dokumentasi dan Informasi Hukum

180.7	Imigrasi
180.7.1	Visa
180.7.2	Pasport
180.7.3	Exit
180.7.4	Reentry
180.7.5	Lintas Batas/ Batas Antar Negara
180.8	Kepenjaraan
180.8.1	Registrasi Narapidana
180.8.2	Pembinaan Narapidana
180.8.3	Pembebasan Narapidana
180.8.4	Tahanan Titipan
180.9	Kejaksaan
180.9.1	Penuntut Umum
180.9.2	Penuntut Khusus
180.10	Konvensi
181	Perdata
181.1	Agraria/ Pertanahan
181.2	Rumah
181.3	Utang Piutang
182	MOU/ Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama
183	Perjanjian
184	Pidana
184.1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
185	Peradilan / Sidang
185.1	Jenis-Jenis Peradilan
185.1.1	Peradilan Umum
185.1.1.1	Pengadilan Negeri
185.1.1.2	Pengadilan Tinggi
185.1.1.3	Mahkamah Agung
185.1.2	Peradilan Agama Islam
185.1.2.1	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
185.1.2.2	Pengadilan Tinggi Agama Islam
185.1.2.3	Mahkamah Agama Islam Agung

180.7	Imigrasi
180.7.1	Visa
180.7.2	Pasport
180.7.3	Exit
180.7.4	Reentry
180.7.5	Lintas Batas/ Batas Antar Negara
180.8	Kepenjaraan
180.8.1	Registrasi Narapidana
180.8.2	Pembinaan Narapidana
180.8.3	Pembebasan Narapidana
180.8.4	Tahanan Titipan
180.9	Kejaksaan
180.9.1	Penuntut Umum
180.9.2	Penuntut Khusus
180.10	Konvensi
181	Perdata
181.1	Agraria/ Pertanahan
181.2	Rumah
181.3	Utang Piutang
182	MOU/ Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama
183	Perjanjian
184	Pidana
184.1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
185	Peradilan / Sidang
185.1	Jenis-Jenis Peradilan
185.1.1	Peradilan Umum
185.1.1.1	Pengadilan Negeri
185.1.1.2	Pengadilan Tinggi
185.1.1.3	Mahkamah Agung
185.1.2	Peradilan Agama Islam
185.1.2.1	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
185.1.2.2	Pengadilan Tinggi Agama Islam
185.1.2.3	Mahkamah Agama Islam Agung

185.1.3	Peradilan Militer
185.1.3.1	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
185.1.3.2	Mahkamah Militer Tinggi
185.1.4	Peradilan Tata Usaha Negara
185.1.4.1	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
185.1.4.2	Pengadilan Tata Usaha Negara / Banding
185.1.4.3	Mahkamah Agung / Kasasi
185.2	Upaya Hukum
185.2.1	Banding
185.2.2	Kasasi
185.2.3	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
185.2.4	Peninjauan Kembali
185.3	Eksekusi
185.4	Pembinaan/ Penyuluhan Hukum
185.4.1	Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
185.5	Bantuan Hukum
185.5.1	Lembaga Bantuan Hukum
186	Hukum Internasional
187	Hukum Adat
188	Hukum Tatanegara
189	Hukum Administrasi Negara
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI / HUBUNGAN INTERNASIONAL
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Kunjungan Ke Luar Negeri
198	Bantuan Luar Negeri
199	-
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program dan Pembinaan politik Luar Negeri

201.1	Pembinaan dan Pemahaman Idiologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa Organisasi Kekuatan Sosial Politik
201.3	Organisasi Kemasyarakatan
201.4	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk laporannya
201.5	Keadaan Politik Luar Negeri
201.6	Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi Pemberitahuan, Ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan
201.7	Hasil Evaluasi dan Tata mengenai ipoleksosbud, hankam
201.8	Orde Baru
201.9	Orde Reformasi
201.10	PARTAI POLITIK
201.10.1	Pendirian/ Pembentukan PARPOL
201.10.2	Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PARPOL
201.10.3	Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
201.10.4	Pembinaan PARPOL
201.10.5	Hasil Munas/ Musda PARPOL
201.10.6	Struktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
201.10.7	Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
201.11	Organisasi Terlarang
201.11.1	Keputusan Perubahan Partai / Organisasi Terlarang
201.11.2	Daftar dan Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang
201.12	Ijin Meninggalkan Tempat atau Domisili Bagi Anggota Organisasi Terlarang
201.13	Daftar Berkala Mengenai Keadaan Organisasi Terlarang
201.14	Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Organisasi Terlarang
02	Organisasi Kemasyarakatan
02.1	Pembentukan Organisasi
02.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
02.3	Kepengurusan Dan Daftar Anggota Organisasi
02.4	Program Kerja Organisasi
02.5	Munas/ Musda Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah
02.6	Kegiatan Organisasi
02.7	Laporan Kegiatan Organisasi

202.8	Pembinaan Organisasi
202.8.1	Kegiatan Organisasi
202.8.2	Daftar Inventarisasi Kekayaan Organisasi
202.8.3	Lembaga Swadaya Masyarakat
202.8.4	Pembentukan Organisasi
202.8.5	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
202.8.6	Kepengurusan Dasar dan Daftar Anggota Organisasi
202.8.7	Program Kerja Organisasi
202.8.8	Laporan Kegiatan Organisasi
203	-
204	-
205	-
206	-
207	-
208	-
209	-
210	KEPARTAIAN
211	Partai Peserta Pemilu
212	-
213	-
214	-
215	-
216	-
217	-
218	-
219	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan
222.1	PEPABRI

222.2	Wreda Tama
222.3	Pensiunan PNS
223	Berdasarkan Kerokhanian Islam
223.1	Muhammadiyah
223.2	NU
223.3	Persatuan Sarikat Islam
223.4	Lembaga Lainnya
224	Berdasarkan Kerokhanian Kristen
225	Berdasarkan Kerokhanian Katolik
226	Berdasarkan Kerokhanian Hindu
227	Berdasarkan Kerokhanian Budha
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Profesi Kesehatan
231.1	Ikatan Dokter Indonesia
231.2	Ikatan Bidan Indonesia
231.3	Ikatan Perawat Indonesia
231.4	Organisasi Lainnya
232	Organisasi Profesi Guru
232.1	Persatuan Guru Republik Indonesia
232.2	Ikatan Guru TK Indonesia
232.3	Persatuan Lainnya
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Badan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Arsiparis Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa

243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	Ikatan Notaris Indonesia
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN PENGUSAHA
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
256	Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
257	-
258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Konggres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	Gerakan Organisasi Wanita (GOW)
265	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
271	Pencalonan
272	Nomor Urut/Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu

275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
277	Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan pemenang pilkada
279	KPU/KPUD
280	PENGAWASAN PEMILU (PANWASLU)
281	Pelanggaran Pemilu
282	Pemantau Pemilu
283	Sengketa Pemilu
284	Panitia Pengawas Kecamatan
285	-
286	-
287	-
288	-
289	-
290	-
291	-
292	-
293	-
294	-
295	-
296	-
297	-
298	-
299	-
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan

300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
300.5	Laporan dari instansi yang berwenang
300.6	Laporan dari kejadian adanya teroris
300.7	Pengamanan sidang (tamu negara)
300.8	Pengawasan Pejabat
301	Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan Pelaksanaan Perda
304	Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya jam malam meliputi pemberitahuan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
308	-
309	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahan Seni dan Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
317	-
318	-
319	-
320	KEMILITERAN/TNI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer

324	Kekaryaannya TNI
325	Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
326	-
327	-
328	-
229	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
331.2	Laporan Kehilangan
332	Huru-hara/Demonstransi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat Kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan/Larangan
339	-
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas dan Matrik Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas
341.2	Pendidikan/latihan Linmas
341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan/latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa

344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi Kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
347	-
348	-
349	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
355.1	Pemalsuan Uang
355.2	Pemalsuan Ijasah
355.3	Kejahatan Pemalsuan Lainnya
356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak (perkosaan/ perbuatan cabul)
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)
360	BENCANA
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/Unsur Pengarahan Penanggulangan Bencana

368	MOU Pemerintahan Pusat BNPB
369	-
370	KECELAKAAN (klasifikasi disini SAR)
371	Latihan SAR
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP)
375	Pelatihan kemampuan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) bagi aparat PBP
376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
389	-
390	KERJASAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi pemerintah Pusat
392	Instansi pemerintah di daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga non pemerintah nasional
395	-
396	-
397	-

398	-
399	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
401.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)
401.2	Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin)
401.3	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
401.4	Kartu Indonesia Pintar (KIP)
402	-
403	-
404	-
405	-
406	-
407	-
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
411	Pembinaan Gotong-Royong
411.1	Swadaya Gotong- royong
411.1.1	Penataan Gotong Royong
411.1.2	Pungutan
411.2	Lembaga Desa / Kelurahan
411.2.1	Pembinaan
411.2.2	Klasifikasi
411.2.3	Kegiatan
411.2.4	Musyawarah
411.3	Latihan kerja masyarakat
411.3.1	Kader Masyarakat
411.3.2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.3.3	Pusat Latihan
411.3.4	Kursus- Kursus
411.3.5	Kurikulum/ Syllabus
411.3.6	Keterampilan
411.3.7	Balai Latihan Kerja
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

411.4.1	Program
411.4.2	Pembinaan Organisasi
411.4.3	Kegiatan
411.4.4	Laporan
411.5	Penyuluhan
411.5.1	Publikasi
411.5.2	Peragaan
411.5.3	Siaran Pedesaan
411.5.4	Penyuluhan Lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.6.1	Kelompok Tani
411.6.2	Dharma Tirta
411.6.3	LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
411.6.4	LMD (Lembaga Musyawarah Desa)
411.6.5	FKD (Forum Kesehatan Desa)
411.6.6	IPSM (Ikatan Paguyuban Sosial Masyarakat)
411.6.7	Karang Taruna
411.6.8	BumDes
411.7	Desa Mandiri Energi Bio Gas
411.8	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.1.1	Pengolahan
412.1.2	Pemasaran
412.2	Keuangan Desa (Pembiayaan Pembangunan Desa)
412.2.1	Inventarisasi Data
412.2.2	Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
412.2.3	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.2.4	Bantuan / Stimulasi
412.2.5	Perkreditan Desa
412.2.6	Pelaporan
412.2.7	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.3.1	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.3.2	Koperasi Unit Desa (KUD)

412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.4.1	Jumlah Desa yang Diberi Bantuan
412.4.2	Pengarahannya
412.4.3	Pusat
412.4.4	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.5.1	Pusat
412.5.2	Daerah
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan
412.6.1	Bantuan Langsung
412.6.2	Bantuan Keserasian
412.6.3	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Sarana dan Prasarana Desa
413.1	Prasarana Desa
413.1.1	Pembinaan
413.1.2	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman kembali penduduk
413.2.1	Lokasi
413.2.2	Pelaksanaan
413.3	Masyarakat Pra Desa
413.3.1	Pembinaan
413.3.2	Penyuluhan
413.4	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
413.4.1	Rumah Sakit
413.4.2	Proyek Perintis Pelaksanaan
413.4.3	Pengembangan
413.4.4	Perbaikan Kampung
413.4.5	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.1.1	Jumlah Desa
414.1.2	Pemekaran Desa
414.1.3	Pembentukan Desa Baru
414.1.4	Evaluasi
414.1.5	Bagian

414.1.6	Batas Desa
414.2	Unit Kerja Daerah Pembangunan (UKDP)
414.2.1	Penyuluhan Program/ Fasilitas Program
414.2.2	Lokasi UDKP
414.2.3	Pelaksanaan
414.2.4	Bimbingan/ Pembinaan
414.2.5	Evaluasi
414.3	Tata Desa/ Profil Desa dan Kelurahan
414.3.1	Inventarisasi
414.3.2	Penyuluhan Pola Tata Desa
414.3.3	Pemetaan
414.3.4	Pedoman Pelaksanaan
414.3.5	Evaluasi
414.4	Perlombaan Desa dan Kelurahan
414.4.1	Pedoman
414.4.2	Penilaian
414.4.3	Kejuaraan
414.4.4	Piagam, Piala
415	Koordinasi
415.1	Sektor Khusus (K)
415.2	Rapat Koordinasi Horisontal
415.3	Team Koordinasi Pusat (TKP)
415.4	Kerjasama
415.4.1	Luar Negeri (UNICEF)
415.4.2	Perguruan Tinggi
415.4.3	Kementrian / Lembaga Pemerintah
415.4.4	Lembaga lainnya
416	Upacara/ Tradisi Desa- Kelurahan
416.1	Sedekah Bumi
416.2	Obor-Obor
416.3	Lomban
416.4	Manganan
416.5	Baratan
416.6	Seni Budaya Desa Lainnya
417	-

418	-
419	-
420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan Karakter bangsa , wawasan kebangsaan , jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
420.4	Dewan Pendidikan Kabupaten
420.5	Komite Sekolah
420.6	Ijin Pendirian dan Pencabutan Sekolah
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra sekolah (PAUD , Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi , Akademi , Universitas , dll)
421.6	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis , Lustrum
421.7	Kegiatan pelajar diantaranya reuni , darmawisata , widyawisata , lomba-lomba , (LKS , olimpiade sains , olimpiade olah raga dan sains) , Pelajar teladan , Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
421.10	Pendidikan Non Formal (Kursus dan Kelembagaan)
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah , testing , OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah , diantaranya SPP , SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah , Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), Surat Keterangan Lulus, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Bantuan Khusus Murid (BKM) , Bantuan Siswa Miskin (BSM)
422.8	Pindah Sekolah
422.9	Unit Produksi Sekolah
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah , Simposium , Seminar

423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan , KKN , Magang / Praktek , PKL (Praktek Industri)
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis , Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar (Guru , Dosen , guru / dosen teladan , guru / dosen berprestasi)
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
424.3	Kegiatan - Kegiatan Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.1.1	Gedung Sekolah
425.1.2	Kampus
425.1.3	Pusat Kegiatan
425.1.4	Perpustakaan
425.1.5	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan/ Sekolah
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
425.6	Koperasi Sekolah
425.7	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
426	Keolahragaan
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.1.1	Cabang Olahraga
426.1.2	Olahraga Prestasi (PON , Sea Games , Kejurnas , Olympiade)
426.1.3	Olahraga Pendidikan (POPDA SD , Porseni dll)
426.1.4	Olahraga Rekreasi / Massal (Senam , sepeda santai , olah raga tradisional)
426.1.5	Iptek dan Industri Olah Raga
426.2	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.2.1	Gedung Olahraga
426.2.2	Stadion
426.2.3	Lapangan
426.2.4	Kolam Renang

426.3	Kemitraan Olah Raga
426.4	Hobby
427	Kepemudaan Meliputi organisasi dan kegiatan remaja Klasifikasi disini : Gelanggang Remaja
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana Kepemudaan , meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan / Kepanduan
429	Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri lihat 890
430	KEBUDAYAAN
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni pewayangan , seni tari , seni musik , seni rupa , seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.2.1	Gedung Kesenian
431.2.2	Padepokan
431.2.3	Lembaga Adat
431.2.4	Kegiatan adat / tradisi
431.3	Usaha pertunjukan , hiburan , kesenangan : festival , pentas seni
432	Kepurbakalan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.2.1	Candi , termasuk pemugaran
432.2.2	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
436	-
437	-

437	-
438	-
439	-
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan (SIK)
440.2	Ijin Kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM , Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK , Posyandu , dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.9.1	JAMKESMAS
441.9.2	JAMKESDA
441.9.3	JAMPERSAL
441.9.4	Kartu Indonesia Sehat
441.9.5	Jaminan lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Penyimpanan
442.3	Penyimpanan obat
442.4	Pemeriksaan obat
442.5	Distribusi obat
442.6	Pengawasan obat
442.6.1	Obat Generik
442.6.2	Obat Terlarang
442.6.3	Pemalsuan Obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P .2.M.L)
443.2.1	Kusta

443.2.3	Frambusia
443.2.4	T.B.C
443.3	Epidemiology dan Karantina (epidka)
443.3.1	Kholera
443.3.2	Imunisasi
443.3.3	Survailense
443.3.4	Antrak
443.3.5	Leptosirosis
443.3.6	Chikungunya
443.3.7	SARS
443.3.8	Flu Burung (Avian Influenza)
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.4.1	Malaria
443.4.2	Dengue Haemorrhagie Fever (DHF) , DBD
443.4.3	Filaria
443.4.4	Serangga
443.4.5	Rabies
443.4.6	Penyakit lainnya
443.5	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.5.1	A. Pektoris
443.5.2	IMA (Irama Mastemik Akut)
443.5.3	Hipertensi
443.5.4	Stroke
443.5.5	Diabetes Melitus (DM)
443.5.6	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.5.7	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.5.8	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.5.9	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Paru , dan penyakit lainnya
443.6	Higiane Sanitasi
443.6.1	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM) , jasa boga
443.6.2	Sarana air minum
443.6.3	Pestisida , Insektisida
443.6.4	Pencemaran Udara
443.6.5	Jamban Keluarga , sanitasi rumah tangga

443.6.6	Kesehatan institusi , misal : Poskestren , sanitasi masjid dll
443.6.7	Higiene sanitasi CA . Mammae
443.6.8	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.6.9	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian Khusus
443.7.1	Dekompensasiokardosis (serangan jantung)
443.7.2	Asma
443.7.3	ISPA
443.7.4	Psikosis
443.7.5	PPOM
443.7.6	Kecelakaan Lalu Lintas
443.7.7	Kejadian Luar Bisa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan , busung lapar , gizi buruk
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok Endemik (GAKI)
445	RSU , RSJ , RS Khusus
445.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien , visum)
445.1.1	Rawat Inap
445.1.2	Rawat Jalan
445.1.3	IGD
445.1.4	IBS
445.1.5	ICU
445.1.6	MCU (<i>Medical Check Up</i>)
445.2	Penunjang Medis
445.2.1	Farmasi
445.2.2	Rekam Medik
445.2.3	Radiologi
445.2.4	Gizi
445.2.5	Laboratorium Klinik
445.2.6	Laboratorium Patologi Anatomi , Forensik
445.2.7	Bank Darah Rumah Sakit

445.2.8	Sanitasi Rumah Sakit
445.2.9	CSSD / Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.6.1	Akreditasi
445.6.2	ISO
445.6.3	PSBH (<i>Problem Solving for Better Hospital</i>)
445.6.4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi layanan kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.1.1	Surat Ijin Praktek (SIP)
446.1.2	Surat Ijin Kerja (SIK)
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.2.1	Perijinan untuk Tenaga Medis
446.2.2	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.2.3	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Pengadaan
447.2	Standarisasi
447.3	Penyimpanan
447.4	Distribusi
447.5	Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Tusuk Jarum / Akupuntur
448.3	Jamu dan herbal
448.4	Dukun

449	Lembaga penyedia layanan kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.1.1	Akreditasi
449.1.2	Sertifikasi Puskesmas
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
449.8	Lembaga penyedia layanan lainnya
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
450.2	Bantuan dibidang keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.1.1	Sholat
451.1.2	Zakat,Fitrah, Infaq , Shodaqoh
451.1.3	Puasa
451.1.4	Umroh dan Haji (jangan diklasifikasikan di sini lihat 457)
451.2	Rumah Ibadah (Masjid , Musholla , Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.4.1	Pendidikan Tinggi Agama
451.4.2	Menengah , MTs , MA
451.4.3	Dasar , Pra Sekolah , MI
451.4.4	Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ / Madrasah Diniyah , Pondok Pesantren dll)
451.4.5	Sarana pendidikan meliputi buku , gedung sekolah dll
451.4.6	Tenaga Pengajar
451.4.7	Dakwah (Pengajian , MTQ)
451.5	Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia , Dewan Hisab Rukyat dll)

451.8	Tokoh Agama , Rohaniawan (Da'i)
451.9	Peribadatan
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama , Rohaniawan (Pendeta , Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
452.6	Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama , Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Katholik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama , Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi , Vihara dll
455.3	Tokoh Agama , Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah Klenteng dll
456.3	Tokoh Agama , Rohaniawan
456.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
457	Urusan Haji
457.1	Manasik Haji

457.2	Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
461.1	Cacat Mata
461.2	Cacat Ganda
461.3	Cacat Fisik
461.4	Cacat Mental
461.5	Bisu/ Tuli
462	Tuna Sosial / Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan / orang terlantar , anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak Nakal
462.5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.1.1	Pengharusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.1.2	Perlindungan Anak
463.1.3	Anak asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.2.1	Perlindungan Perempuan
463.2.2	Ibu Teladan
463.2.3	Pengharusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan , tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
464.2	Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan , penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan , pengungsian , rehabilitasi
465.3	Rumah Tidak Layak Huni

465.4	Program Keluarga Harapan (PKH)
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.1.1	Jaminan Sosial
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan / bantuan musibah, meliputi : penyelenggaraan undian , ketangkasan , bazaar dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan , kesehatan , pemukiman , Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI (Palang Merah Indonesia)
468.1	Donor Darah
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Belanda
469.4	Khusus , Keluarga , Raja
469.5	Krematorium
469.6	Lainnya
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.1.1	Biodata
471.1.2	Nomor Induk Kependudukan
471.1.3	Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
471.1.4	Kartu Keluarga
471.1.5	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.2.1	Perpindahan penduduk WNI
471.2.2	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.2.3	Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
471.2.4	Daerah Terbelakang
471.2.5	Bedol Desa
471.3	Perpindahan penduduk antar Negara

471.3.1	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.3.2	Orang Asing tinggal sementara
471.3.3	Orang asing tinggal tetap
471.3.4	Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.4.1	Akibat bencana alam
471.4.2	Akibat kerusuhan sosial
471.4.3	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.4.4	Pendaftaran penduduk rentan
472	Pencatatan sipil
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.1.1	Kelahiran
472.1.2	Kematian
472.1.3	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.2.1	Perkawinan agama Islam
472.2.2	Perkawinan agama non Islam
472.2.3	Perceraian agama Islam
472.2.4	Perceraian agama non Islam
472.2.5	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.3.1	Pengangkatan anak
472.3.2	Pengakuan anak
472.3.3	Pengesahan anak
472.3.4	Perubahan akta
472.3.5	Pembatalan akta
472.3.6	Advokasi
472.4	Pencatatan kewarganegaraan
472.4.1	Akibat perkawinan
472.4.2	Akibat kelahiran
472.4.3	Non Perkawinan/ Non Kelahiran
472.4.4	Naturalisasi
472.4.5	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan

473.1	Teknologi Informasi
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
473.2.1	Pendaftaran penduduk
473.2.2	Kejadian vital penduduk
473.2.3	Penduduk non registrasi
473.3	Pelayanan informasi kependudukan
474	Perkembangan pendudukan
474.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
474.1.1	Struktur Jumlah
474.1.2	Komposisi
474.1.3	Fertilitas
474.1.4	Kesehatan Reproduksi
474.1.5	Morbiditas Penduduk
474.1.6	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.2.1	Anak dan remaja
474.2.2	Penduduk usia produktif
474.2.3	Penduduk lanjut usia
474.2.4	Gender
474.3	Penataan Persebaran Penduduk
474.3.1	Migrasi antar wilayah
474.3.2	Urbanisasi
474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Pendudukan
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
475	Transmigrasi
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.1.1	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
475.1.2	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.1.3	Permasyarakatan / sosialisasi transmigrasi
475.1.4	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.1.5	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
475.1.6	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi

475.1.7	Kerjasama di bidang transmigrasi
475.1.8	Kepulauan transmigran karena daerah terjadi konflik
475.2	Pemukiman transmigrasi
475.2.1	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
475.2.2	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.2.3	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
475.2.4	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi / peta informasi pemukiman
475.2.5	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi
475.2.6	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
475.2.7	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
475.2.8	Tata ruang pemukiman transmigrasi
475.2.8.1	Rancangan dan pemanfaat areal tanah
475.2.8.2	Rancangan kapling TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri)
475.2.8.3	Pengukuran dan pembagian lahan dan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
475.2.8.4	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
475.2.8.5	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.2.8.6	Pengukuran batas unit pemukiman
475.2.8.7	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.2.9	Sarana pemukiman transmigrasi
475.2.9.1	Pembinaan dan pengadalan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.2.9.2	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
475.2.9.3	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.2.9.4	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.2.9.5	Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
475.3.1	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penetapan

475.3.2	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.3.3	Pengerahan
475.3.3.1	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.3.3.2	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.3.3.3	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.3.4	Pemberangkatan transmigran
475.3.4.1	Pengangkutan transmigran melalui laut , udara , dan darat
475.3.4.2	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.3.4.3	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.3.4.4	Pengawalan perjalanan transmigran
475.3.4.5	Pengaturan rute pemberangkatan
475.3.4.6	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.3.5	Penempatan Transmigran
475.3.5.1	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.3.5.2	Pendataan transmigrasi di lokasi yang masih dibina
475.3.5.3	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.3.5.4	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito) , dan pelatihan transmigran
475.4.1	Pelatihan transmigran
475.4.1.1	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.4.1.2	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.4.1.3	Penyusunan calon peserta / pelatih
475.4.2	Penampungan transmigran di transito
475.4.2.1	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.4.2.2	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.4.2.3	Pelayanan pembekalan / peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi
475.5.1	Identifikasi dan penjaga pembinaan
475.5.1.1	Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.5.1.2	Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.5.1.3	Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.5.2	Pembinaan Pendidikan
475.5.2.1	Penyediaan / penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan

475.5.2.2	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.5.3	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.5.4	Pembinaan kesehatan
475.5.4.1	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475.5.4.2	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.5.4.3	Pendistribusian bantuan pangan
475.5.5	Pembinaan Rokhani
475.5.5.1	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.5.5.2	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.5.5.3	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.5.6	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.5.7	Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan
475.5.8	Penilaian transmigran teladan
475.5.9	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
476	Keluarga Berencana
476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB
476.2.1	KB lestari
476.2.2	KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.3.1	Orientasi/ Pelatihan BKB, UPPKS, PRKB. DLL
476.4	Pos KB desa
476.5	Akseptor KB
476.5.1	Peran/ Partisipasi Pria dalam berKB
477	Catatan Sipil
478	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
479	Keluarga Sejahtera
480	MEDIA MASSA
480.1	Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
480.2	Ijin Reklame
481.1	Penerbitan/ Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1.1	Surat Kabar
481.1.2	Majalah
481.1.3	Buletin

481.1.4	Klarifikasi Berita
481.1.5	Press Release, Press Statistik
481.1.5.1	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.1.5.2	Perkonomian dan Perbankan
481.1.5.3	Bidang lainnya
481.1.6	Layanan Informasi / Leaflet
481.1.7	Masukan Analisis Bupati
481.1.8	Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
481.1.9	Jurnal Mingguan Pendapatan
481.2	Liputan Media Massa
481.2.1	Liputan Rutin
481.2.2	Liputan Khusus
481.2.2.1	Arus Lebaran
481.2.2.2	Pemberangkatan dan Kepulangan Haji
481.2.3	Liputan Berita Daerah
481.3	Pencabutan Surat Ijin
481.3.1	Surat Kabar
481.3.2	Majalah
481.3.3	Buletin
481.4	Laporan dan Hasil Pemberitaan
481.4.1	Surat Kabar
481.4.2	Majalah
481.4.3	Grafika
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Reklame / Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan reklame
483.2	Penerbitan

483.3	Pameran (Non Komersial)
483.4	Pengajuan Pembuatan Baliho
484	Kewartawanan / Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan (penghinaan, pemukulan, penganiayaan)
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada / dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawaharah Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers / Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Wawancara/ Audiensi Wartawan
484.10	Kunjungan Wartawan Asing
484.11	Kerjasama Dengan Media Massa/ Media Elektronik
485	Penerangan / Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Photograph Competition
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Organisasi Kemasyarakatan / Non Pemerintah
487.1.1	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.1.2	Bintek Pengurus Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.1.3	Bahan Informasi Cetak Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.1.4	Fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media
487.1.5	Pelatihan motivator
487.1.6	Pembekalan LKM / Upaya PPBN
487.1.7	Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
487.1.8	Lembaga Komunikasi Masyarakat

487.2	Lembaga Pemerintah
487.2.1	Forum informasi dan kehumasan
487.2.2	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.2.3	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
487.2.4	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.3.1	Promosi luar negeri
487.3.2	Kunjungan Wartawan asing
488	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi
488.1	Pembuatan Foto Blow Up Side
488.2	Tayangan udara tentang kebijakan dan hasil pembangunan
488.3	Pelayanan informasi melalui feature
488.4	Pelayanan informasi melalui spot
488.4.1	Televisi
488.4.2	Radio
488.5	Pelayanan Informasi Melalui media tradisional
488.5.1	Kesenian Rakyat
488.6	Dialog interaktif
488.6.1	Bupati menyapa
488.6.2	Diskusi interaktif satu jam bersama Bupati
488.7	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
488.8	Pejabat Pengelola Informasi Daerah
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati
489.1	Himpunan Naskah Sambutan
489.2	Klasifikasi naskah sambutan
489.3	Himpunan dialog interaktif
489.4	Himpunan naskah rubrik dan keynote speaker
489.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	FKIK
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-

497	-
498	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan stabilisasi
500.2	KADIN
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya , Untuk perizinan sesuai Bidang , klasifikasi pada masalahnya
503.1	Ijin prinsip
503.2	Ijin gangguan (HO)
503.3	Ijin perdagangan
503.3.1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
503.3.2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
503.3.3	Tanda Daftar Gudang (TDG)
503.3.4	Ijin Usaha Industri (IUI)
503.4	Ijin-ijin lainnya
504	Pengaduan perizinan perusahaan
505	Pembinaan, pengawasan, pengendalian ke perusahaan
506	Cek Lokasi
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN Klasifikasi di sini : Tata Niaga
510.1	Promosi perdagangan
510.1.1	Pekan raya
510.1.2	Iklan
510.1.3	Pameran
510.1.4	Event-event
510.1.5	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.1.6	Pasar
510.1.7	Pertokoan, kios, PKL
510.2	Pelelangan, distribusi

510.2.1	Pemasaran Sembako
510.2.2	Pemasaran hasil industry
510.2.3	Penentuan harga pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.3.1	Rencana dan Program kerja
510.3.2	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.3.3	Pelaksanaan Teknis
510.3.4	Pemantauan
510.3.5	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan
510.4.1	Perpanjangan
510.4.2	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.5.1	Kerjasama bahan baku
510.5.2	Industri pemasaran
510.5.3	Kontrak
510.6	Tera
510.6.1	Tera Ulang
510.6.2	Takaran
510.6.3	Timbangan dan anak timbangan
510.6.4	Kalibrasi
510.6.5	Cap tanda tera
510.6.6	Biaya tera
510.7	Bantuan peralatan
510.7.1	Proposal
510.7.2	Surat perjanjian / kontrak
510.7.3	Serah terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.9.1	Standart Tingkat Tiga
510.9.2	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.9.3	Ukuran Metrologi
510.9.3.1	Peralatan
510.9.3.2	Laboratorium Metrologi Legal
510.9.3.3	Tanki Ukur Mobil

510.9.3.4	Meter Taxi
510.9.3.5	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.9.3.6	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	P a s a r
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ijin Ekspor
512.2	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.3	Managemen Perdagangan internasional
512.4	Eksport Hasil Industri
512.4.1	Kebijakan
512.4.2	Pemasaran
512.5	Pemberitahuan Eksport Barang
512.6	Pengawasan Mutu Barang
512.7	Eksportir Terdaftar
512.8	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.1.1	Pemberian Ijin
513.1.2	Pengendalian ijin
513.1.3	Pemantauan Ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.4.1	Pembinaan Import
513.4.2	Pengendalian Import
513.4.3	Pemantauan Import
513.5	Faktor- faktor Pendukung
513.6	Pengawasan Mutu Barang Import
513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.7.1	Bahan Konsumsi

513.7.2	Bahan Baku
513.7.3	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan-Baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti Kemas
516.2	Tangki penyimpanan
517	Aneka usaha perdagangan
518	Koperasi
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.1.1	Koperasi Pertanian dan perkebunan
518.1.1.1	koperasi pertanian tanaman pangan
518.1.1.2	Koperasi perkebunan
518.1.2	Koperasi perikanan dan peternakan
518.1.2.1	Koperasi perikanan
518.1.2.2	Koperasi Peternakan
518.1.3	Permodalan Koperasi
518.1.3.1	Pemupukan Modal
518.1.3.2	Pemanfaatan Modal
518.1.3.3	Perbankan dan Asuransi
518.1.3.4	Permodalan Luar Koperasi
518.1.3.5	Kredit Program Umum
518.1.3.6	Kredit Program Khusus
518.1.4	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.1.4.1	Distribusi Bahan Pokok
518.1.4.2	Distribusi Aneka Bahan
518.1.4.3	Distibusi Kerjasama Niaga
518.1.4.4	Jasa Angkutan

518.1.4.5	Jasa Perumahan
518.1.4.6	Aneka Jasa
518.1.5	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.1.5.1	Koperasi kelistrikan
518.1.5.2	Koperasi Industri
518.1.5.3	Koperasi telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.2.1	Organisasi Koperasi
518.2.1.1	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.2.1.2	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.2.1.3	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.2.1.4	Perangkaan / Keragaan Koperasi
518.2.1.5	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.2.1.6	Amalgamasi (klarifikasi)
518.2.1.7	Tertib Organisasi Koperasi
518.2.1.8	Penyelesaian Penyelesaian / Persengketaan
518.2.1.9	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.2.2	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.2.2.1	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.2.2.2	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.2.2.3	Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.2.2.4	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.2.3	Bina Tata Laksana Koperasi
518.2.3.1	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.2.3.2	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.2.3.3	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.2.3.4	Klasifikasi KUD Mandiri
518.2.4	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.2.4.1	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.2.4.2	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.2.4.3	Karyawan / Manager Koperasi
518.2.4.4	Sumber Daya Manusia
518.2.4.5	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.2.4.6	Penyaluran Alat Sekolah
518.2.4.7	Bantuan Pemda kepada Koperasi / KUD

518.2.5	Akuntansi
518.2.5.1	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.2.5.2	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.2.5.3	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.2.6	Pengawasan Koperasi
518.2.6.1	Pengawasan Koperasi Primer
518.2.6.2	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.2.6.3	Koperasi Jasa Audit
518.2.6.4	Kerjasama Kantor Akuntan
518.2.7	Penyuluhan Koperasi
518.2.7.1	Pembinaan Kader Koperasi
518.2.7.2	Masyarakat Umum
518.2.7.3	Forum Komunikasi
518.2.7.4	Kelompok Tani
518.2.7.5	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.2.7.6	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.3.1	Pembinaan Usaha
518.3.1.1	Pembinaan Usaha Mikro
518.3.1.2	Pembinaan Usaha Kecil
518.3.1.3	Pembinaan Usaha Menengah
518.3.2	Kredit usaha
518.3.2.1	Kredit usaha kecil
518.3.2.1	Kredit usaha menengah
518.3.3	Pengawasan Usaha
518.3.3.1	Pengawasan Usaha Mikro
518.3.3.2	Pengawasan Usaha Kecil
518.3.3.3	Pengawasan Usaha Menengah
519	-
520	PERTANIAN
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.1.1	Bina Ketahanan Pangan
521.1.2	Pelaporan Dan Evaluasi Pertanian
521.1.3	Bimas / Inmas Termasuk Kredit

521.2	Peningkatan Produksi Tanaman Strategi Pangan
521.2.1	Padi
521.2.1.1	Sawah
521.2.1.2	Gogo
521.2.1.3	Huma
521.2.2	Palawija
521.2.2.1	Kacang
521.2.2.2	Jagung
521.2.2.3	Ketela pohon
521.2.2.4	Ubi- ubian
521.2.2.5	Kedelai
521.2.3	Holtikultura
521.2.4	Sayuran
521.2.5	Buah- buahan
521.2.6	Tanaman hias
521.2.7	Perlebahan
521.2.8	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.3.1	Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya
521.3.2	Pembenihan dan pembibitan
521.3.3	Pupuk
521.3.4	Irigasi Pertanian
521.3.5	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.4.1	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.4.1.1	Penyakit Tanaman Pangan (daun dan batang)
521.4.2	Hama tanaman pangan
521.4.2.1	Hama Serangga, diklasifikasikan : wereng, walang sangit, tungro
521.4.2.2	Hama tikus dan sejenisnya
521.4.3	Pemberantas
521.4.4	Pestisida
521.4.4.1	Agensia Pengendalian Hayati
521.5	Tanah Pertanian Pangan
521.5.1	Persawahan
521.5.2	Perladangan

521.5.3	Kebun/ pembibitan
521.6	Pengusaha , Petani
521.7	Lahan kritis / KTA
521.8	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8.1	Pemasaran tanaman pangan
521.8.2	Pemasaran hortikultura
521.9	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
521.9.1	Pengembangan sumber daya pertanian
521.9.2	Balai benih pertanian
522	Kehutanan
522.1	Perencanaan Hutan
522.1.1	Survey
522.1.1.1	Survey PPA
522.1.1.2	Survey Areal
522.1.1.3	Survey Pembinaan Hutan
522.1.1.4	Survey Potensi Hutan
522.1.2	Pendataan / Inventarisasi Areal Hutan
522.1.2.1	Data Areal Tata Guna Hutan
522.1.2.2	Data areal konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.2.1	Tata Ruang Kawasan
522.2.1.1	Pengurusan kawasan Hutan
522.2.1.2	Penafsiran Hutan
522.2.1.3	Mutasi Hutan
522.2.2	Tata Hutan
522.2.2.1	Tata Hutan Sementara
522.2.2.2	Tata Hutan Tetap
522.2.2.3	Pembukaan Hutan
522.2.3	Pengukuran dan Pemetaan
522.2.3.1	Pengukuran
522.2.3.2	Perpetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.3.1	Data Areal HPH
522.3.1.1	Areal HPH
522.3.1.2	SK HPH

522.3.1.3	Kerja sama
522.3.1.4	Pembatalan / Penolakan
522.3.2	Modal dan Peralatan
522.3.2.1	Inventarisasi Logging
522.3.2.2	Inventarisasi Industri
522.3.2.3	Peralatan
522.3.2.4	Tenaga Kerja Pengusaha Hutan
522.3.2.5	Pemegang Saham
522.3.2.6	Neraca Perusahaan
522.3.3	Rencana Kerja
522.3.3.1	KPHP (Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi)
522.3.3.2	RKPH (Rencana Karya Pengusahaan Hutan)
522.3.3.3	Rencana karya lima tahun RKPH
522.3.4	Perpanjangan HPH (Hak Pengusahaan Hutan)
522.3.5	Produksi
522.3.5.1	Target Produksi
522.3.5.2	Produksi Kayu
522.3.5.3	Produksi Non - Kayu
522.3.6	Industri
522.3.6.1	Industri Kayu HPH
522.3.6.2	Industri Kayu Non-HPH
522.3.6.3	Industri Non Kayu
522.3.7	Pembinaan HPH
522.3.7.1	Pelanggaran dan Sanksi pengrusakan hutan
522.3.7.2	Pengrusakan hutan
522.3.7.3	Pembalakan liar/ ilegal login
522.3.7.4	Memotarium
522.3.8	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.3.8.1	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.3.8.2	Hutan Tanaman Industri
522.3.9	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.4.1	Standarisasi
522.4.1.1	Kayu
522.4.1.2	Non Kayu

522.4.2	Pengujian Hasil Hutan
522.4.2.1	Surat keterangan shahnya hasil hutan
522.4.3	Pengembangan
522.4.3.1	Pengembangan Perusahaan
522.4.3.2	Pengembangan Pemasaran
522.4.4	Pemasaran Hasil Hutan
522.4.5	Angkutan Hasil Hutan
522.4.5.1	Sarana dan Prasarana
522.4.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.4.6	Tata Usaha Hasil Hutan
522.4.7	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.5.1	Konservasi Jenis
522.5.1.1	Satwa yang dilindungi
522.5.1.2	Satwa yang tidak dilindungi
522.5.1.3	Lembaga Konservasi Satwa
522.5.1.4	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.5.2	Kawasan Konservasi
522.5.2.1	Cagar Alam (termasuk laut)
522.5.2.2	Suaka Margasatwa
522.5.2.3	Taman Wisata (termasuk laut)
522.5.2.4	Taman Nasional
522.5.2.5	Taman Hutan Raya / Kebun Raya
522.5.2.6	Taman Baru
522.5.2.7	Hutan Lindung
522.5.2.8	Hutan kota
522.5.2.9	Hutan mangrove
522.5.2.10	Hutan rakyat
522.5.3	Pengkajian Lingkungan
522.5.3.1	Amdal UKL , UPL , Di Dalam Kawasan Hutan
522.5.3.2	Amdal UKL , UPL , Di Luar Kawasan Hutan
522.5.4	Bina Cinta Alam
522.5.4.1	Kelompok Pecinta Alam
522.5.4.2	Kader konservasi Sumber Daya Alam
522.5.4.3	Penyuluhan konservasi Sumber Daya Alam

522.5.4.4	LSM Peduli Hutan
522.5.5	Pengamanan Hutan
522.5.5.1	Jaga Wana (polisi hutan)
522.5.5.2	PPNS
522.5.5.3	Gangguan Keamanan Hutan
522.5.5.4	Bencana Alam
522.5.5.5	Kebakaran Hutan
522.5.5.6	Sengketa Hutan
522.5.5.7	Hama dan Penyakit
522.5.5.8	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.5.5.9	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi, Rehabilitasi Hutan, dan Penyimpanan Benih
522.6.1	Pembenihan
522.6.1.1	Tegakan Benih
522.6.1.2	Pengadaan Benih
522.6.1.3	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.6.1.4	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.6.1.5	Pembibitan
522.6.1.6	Pengadaan dan Penedar Bibit Bersertifikat
522.6.1.7	Pengadaan dan Penedar Bibit Tidak Bersertifikat
522.6.2	Tanaman Reboisasi
522.6.2.1	Lahan Kritis
522.6.2.2	Reboisasi (Hutan Negara) Lahan HPH
522.6.2.3	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.6.2.4	Konservasi Tanah dan Air
522.6.2.5	Pengendalian Perladangan
522.6.2.6	Penghijauan (hutan rakyat)
522.6.2.7	Aneka Usaha Kehutanan
522.6.3	Perhutanan Sosial
522.6.3.1	Sutera Alam
522.6.3.2	Minyak Kayu Putih
522.6.3.3	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.7.1	Hutan Produksi Terbatas
522.7.2	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi

522.8	Kawasan Lindung
523	Perikanan dan Kelautan
523.1	Rencana , Program , Statistik , Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
523.1.1	Penyuluhan
523.1.2	Teknologi dan pengembangan (budidaya ikan, tambak)
523.2	Produksi Perikanan
523.2.1	Pelelangan
523.2.2	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.2.3	Perikanan Budidaya : CBIB , CBIC
523.2.4	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.3.1	Pelatihan Nelayan
523.3.2	Pembinaan wanita nelayan
523.3.3	Fasilitas perijinan : SIUP , SIPI , SKP
523.3.4	Perbenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
523.4.1	Ekspor Komoditas Hasil Perikanan
523.4.2	Impor Hasil Perikanan
523.4.3	Pemasaran Dalam Negeri
523.4.4	Pengusaha Perikanan
523.4.5	Promosi Komoditas Unggulan
523.5	Sarana Perikanan
523.5.1	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.5.2	TPI / PPI
523.5.3	Kesyahbandaran
523.5.4	Peralatan penangkapan : kapal , perahu , jaring , pump dsb
523.6	Pengendalian hama dan penyakit
523.6.1	Penyakit Ikan
523.6.2	Hama Ikan
523.6.3	Obat - obatan termasuk sertifikasinya
523.7	Pengusaha, nelayan
523.7.1	Kapal/ motor boat
523.7.2	Jaring
523.7.3	Cold Storage
523.7.4	Tempat Es

523.7.5	Bantuan Nelayan
523.7.6	Tempat pelelangan ikan
523.7.7	Pembibitan / penyuluhan nelayan
523.8	Konservasi dan Suaka Laut
523.8.1	Transplantasi bibit karang
523.8.2	Terumbu Karang
523.8.3	Mangrove
523.8.4	Garam
523.8.5	Harta karun di dalam laut
523.8.6	Pembinaan / Pendidikan masyarakat pesisir
524	Peternakan dan Kesehatan Hewan
524.1	Produksi
524.1.1	Perbibitan
524.1.2	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
524.1.3	Budidaya
524.2	Sarana Usaha Peternakan
524.2.1	Pelayanan Usaha
524.2.2	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.2.3	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.3.1	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
524.3.2	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
524.3.3	Obat-obatan Hewan
524.3.4	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Pelayanan Usaha dan Pemasaran
524.4.1	Promosi produksi peternakan
524.4.2	Pemasaran peternakan
524.4.2.1	Pemasaran produksi peternakan
524.4.3	Ijin usaha peternakan
524.5	Pengawasan dan standarisasi
524.5.1	Rumah potong hewan
524.5.2	Laboratorium
524.5.3	Standarisasi bibit ternak
524.6	Pengembangan peternakan
524.6.1	Inseminasi buatan

524.6.2	Pembibitan
524.6.3	Kawasan peternakan
524.6.4	Penyebaran ternak
524.7	Data informasi
524.7.1	Data peternakan
524.7.2	Informasi peternakan
524.8	Organisasi peternakan
524.8.1	Asosiasi peternakan
524.8.2	Kelompok tani ternak
525	Perkebunan
525.1	Rencana, Program dan Pelaporan
525.1.1	Pelaporan
525.1.2	Monitoring
525.1.3	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.2.1	Karet
525.2.2	Teh
525.2.3	Tembakau
525.2.4	Tebu
525.2.5	Cengkeh
525.2.6	Kelapa / Kopra / Kelapa Sawit
525.2.7	Kopi
525.2.8	Kakao
525.2.9	Jenis Tanaman yang lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.3.1	Benih
525.3.2	Pembibitan
525.3.3	Kelompok Tani
525.3.4	Kemitraan
525.3.5	Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
525.3.6	Pemasaran Hasil Perkebunan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.4.1	Hama
525.4.2	Pestisida
525.4.3	Pupuk

525.4.4	Agensia Pengendalian Hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.5.1	Power Sprayer
525.5.2	Hand Sprayer
525.5.3	Polibag
525.5.4	Alat Laboratorium Perkebunan
525.5.5	Reagen
525.5.6	Sarana / Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.6.1	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.7.1	Penyuluhan
525.7.2	Sosialisasi
525.7.3	Informasi
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.2.1	Pembinaan Teknologi
526.2.2	Sarana Produksi dan Permodalan
526.2.3	Kelembagaan
526.3	Agrobisnis
526.3.1	Mutu Hasil
526.3.2	Pengelolaan Hasil Pangan
526.3.3	Pemasaran Hasil
526.3.4	Kemitraan
526.4	Distribusi Pangan
526.4.1	Sistem dan Pola Distribusi
526.4.2	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1	Rawan Pangan , Keamanan dan Mutu Pangan
526.5.2	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.5.3	Sistem Informasi Pangan
527	Penyuluhan
527.1	Sumber Daya Manusia

527.1.1	Penyuluh
527.1.2	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.1.3	Stake Holder
527.2	Kelembagaan
527.2.1	Struktural
527.2.2	Non Struktural
527.2.3	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.2.4	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.3.1	Program / Metode
527.3.2	Promosi / pameran / kampanye
527.3.3	Penghargaan / lomba
527.3.4	Materi
528	-
529	-
530	PERINDUSTRIAN
531	Industri Logam
532	Industri Mesin / Elektronik
533	Industri Kimia / Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan / Minuman
536	Aneka Industri / Perusahaan
536.1	Home Industri / Aneka Kerajinan
536.1.1	Kerajinan Rakyat
537	Industri Kayu / Meubel
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Badan Usaha Milik Daerah
539.1	Pembentukan
539.2	Penggabungan
539.3	Pembubaran
539.4	Perusahaan Daerah (Perusda, PDAM)
539.4.1	Program kerja dan anggaran

539.4.2	Penyertaan modal
539.4.3	Urusan kepegawaian
539.4.4	Pembagian laba/ deviden
539.4.5	Laporan bulanan
539.4.6	Laporan tahunan
539.4.7	Perencanaan dan pemeliharaan peralatan
539.4.8	Produksi dan distribusi
539.4.9	Baca meter
539.4.10	Jasa keuangan non bank
539.5	Perjanjian kerjasama
540	PERTAMBANGAN / KELAUTAN
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Kontrak Kerja
541.2	Pengolahan
541.3	Penyaluran
541.4	Tangki , Pompa , Tanker
542	Gas bumi
543	Logam mulia meliputi : intan, emas, perak
544	Logam
544.1	Timah
544.2	Alumunium, boxit
544.3	Besi, termasuk besi tua
544.4	Tembaga
545	Energi
545.1	Energi alternatif
545.1.1	Gas Rawa
545.1.2	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
545.1.3	Biogas
545.1.4	Energi baru terbarukan
545.1.5	Perijinan
545.1.6	Rekomendasi
545.1.7	Pembinaan dan Pengawasan
545.2	Konservasi Energi
545.3	Pemetaan Energi
545.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)

546	Pertambangan , mineral dan batubara
546.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
546.1.1	WIUP Batuan
546.1.2	WIUP Bukan Logam
546.1.3	WIUP Logam
546.1.4	WIUP Batubara
546.2	Rekomendasi Teknis
546.3	Perijinan
546.3.1	IUP Eksplorasi
546.3.2	IUP Operasi Produksi
546.3.3	IUP Operasi Produksi Khusus
546.3.4	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
546.3.5	Pencabutan Ijin
546.4	Pembinaan
546.5	Pengawasan
546.5.1	Pengawasan Usaha Pertambangan
546.5.2	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
546.6	Pasca Tambang
546.6.1	Reklamasi
546.6.2	Penutupan
546.7	Air Tanah
546.7.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
546.7.2	Pemetaan CAT
546.7.3	Imbuhan CAT
546.7.4	Lepasan CAT
546.7.5	Konservasi
546.7.6	Pengendalian Daya Rusak
546.8	Rekomendasi Teknis
546.8.1	Sumur Artesis
546.8.2	Sumur Bor
546.8.3	Sumur Gali (Pasak)
546.8.4	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
546.8.5	Sumur Pantau
546.8.6	Harga Dasar Air / Nilai Perolehan Air
546.8.7	Hidrologi

547	Geologi
547.1	Pemetaan
547.2	Mitigasi Bencana Geologi
547.3	Vulkanologi
547.3.1	Pengawasan Vulkanologi
547.3.2	Panas Bumi
547.4	Hidrogeologi
547.5	Sumber daya mineral
547.6	Gerakan tanah (longsor , amblesan)
547.7	Pengawasan , pengendalian
548	Kesamudraan
549	Penghematan energi
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu Lintas Jalan Raya , Sungai , Danau
551.1.1	Keamanan Lalu Lintas , Rambu-rambu
551.1.2	Uji Kelayakan kendaraan Bermotor (Keur)
551.1.3	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.2.1	Perizinan (trayek, usaha angkutan)
551.2.2	Terminal
551.2.2.1	Sarana dan prasarana terminal
551.2.2.2	Evaluasi dan pelaporan terminal
551.2.3	Alat Angkutan
551.2.4	Jembatan Timbang / Lebih Muatan
551.2.5	Uji Mutu (kendaraan baru, berkala)
551.3	Perparkiran
551.3.1	Pengelolaan perparkiran
551.3.2	Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas perparkiran
551.4	Angkutan Sungai
551.4.1	Keselamatan , Rambu-rambu
551.4.2	Lalu Lintas
551.4.3	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.4.4	Trayek
551.4.5	Sarana / Kapal

551.4.6	Pelabuhan
551.4.7	Terminal
551.4.8	Kecelakaan
551.4.9	Perizinan
551.5	Angkutan Danau
551.5.1	Keselamatan , Rambu-rambu
551.5.2	Lalu Lintas
551.5.3	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.5.4	Trayek
551.5.5	Sarana /Kapal
551.5.6	Pelabuhan
551.5.7	Kecelakaan
551.5.8	Perizinan
551.6	Feri
551.6.1	Sarana dan prasarana / kapal
551.6.2	Pelabuhan
551.6.3	Trayek
551.6.4	Angkutan penumpang, angkutan barang
551.6.5	Keselamatan
551.6.6	Kecelakaan
551.6.7	Perawatan / perbaikan
551.6.8	Perijinan
551.7	Perkereta-Apian
551.7.1	Sarana meliputi Lokomotif , Gerbong , Bogje
551.7.2	Prasarana (Jalan / Jembatan)
551.7.3	Trayek
551.7.4	Angkutan Penampungan
551.7.5	Angkutan Barang
551.7.6	Keselamatan
551.7.7	Kecelakaan
551.7.8	Perawatan / Perbaikan
551.7.9	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.1.1	Pelayaran Dalam Negeri

552.1.2	Pelayaran Luar Negeri
552.1.3	Pelayaran Haji
552.1.4	Pelayaran Charter / Wisata Turis
552.1.5	Pelayaran Khusus
552.1.6	Keamanan Lalu Lintas , Rambu-rambu
552.2	Perkapalan – Alat Angkutan
552.2.1	Kapal Penumpang
552.2.2	Kapal Barang
552.2.3	Kapal Perang / Patroli / Negara
552.2.4	Kapal Tanker
552.2.5	Ponton / Tongkang
552.2.6	Kapal Layar
552.2.7	Kapal Layar Motor
552.2.8	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.3.1	Tanah / Lokasi
552.3.2	Alur Layar
552.3.3	Dermaga
552.3.4	Terminal Penumpang
552.3.5	Terminal Kontainer
552.3.6	Bangunan / Gedung / Gudang
552.3.7	Perlengkapan Tambat Labuh
552.3.8	Lapangan Penumpukan
552.3.9	Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
552.3.10	Penerbitan pas kecil
552.4	Pengerukan / Perawatan
552.4.1	Alur Pelayaran
552.4.2	Kolam Pelabuhan
552.4.3	Reklamasi Pantai
552.4.4	Dumping Area
552.4.5	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.5.1	Patroli Bandar
552.5.2	Patrol Perairan
552.5.3	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)

552.6	Angkutan Barang
552.6.1	Pos
552.6.2	Minyak
552.6.3	Log
552.6.4	Ternak
552.6.5	Sembilan Bahan Pokok
552.6.6	Peti Kemas / EMKL
552.6.7	Muatan Umum
552.6.8	Barang Dalam Negeri , Barang Luar Negeri
552.6.9	Bongkar Muatan
552.7	Keselamatan
552.7.1	Rambu-rambu / Mercu suar
552.7.2	Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
552.7.3	Fasilitas Keselamatan / Keamanan
552.7.4	Telekomunikasi Pelayaran
552.7.5	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.7.6	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan , Gangguan
552.8.1	Kecelakaan Penumpang / Kapal
552.8.2	Kecelakaan Barang
552.8.3	Gangguan Sarana / Prasarana
552.8.4	Pembajakan / Penyelundupan
552.8.5	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.9.1	Ijin Berlayar
552.9.2	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.9.3	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.9.4	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.9.5	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.9.6	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.9.7	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.9.8	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.9.9	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara

553.1.1	Penerbangan Domestik
553.1.2	Penerbangan Luar Negeri
553.1.3	Penerbangan Haji
553.1.4	Penerbangan Charter / Non Reguler
553.1.5	Penerbangan Khusus / Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.2.1	Tanah / Lokasi
553.2.2	Landasan
553.2.3	Apron
553.2.4	Terminal Penumpang
553.2.5	Terminal Cargo
553.2.6	Bangunan / Gedung
553.2.7	Perlengkapan
553.2.8	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.3.1	Pesawat Udara
553.3.2	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.4.1	Pos
553.4.2	Muatan Dalam Negeri
553.4.3	Muatan Luar Negeri
553.4.4	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelayakan
553.5.1	Kelayakan Pesawat Udara
553.5.2	Kelayakan Peralatan Penunjang
553.5.3	Kelayakan Personil / Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.6.1	Rambu-rambu
553.6.2	Perakitan / Kalibrasi
553.6.3	Fasilitas Keselamatan
553.6.4	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / Gangguan
553.7.1	Kecelakaan Penumpang
553.7.2	Kecelakaan Barang
553.7.3	Gangguan Sarana / Prasarana

553.7.4	Pembajakan
553.7.5	Pencemaran
553.8	Umum
553.8.1	Asuransi
553.8.2	Asosiasi
553.8.3	SATPAM
553.8.4	Rally Udara / Lomba
553.9	Perijinan
553.9.1	Ijin Terbang / Flight Approval
553.9.2	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
553.9.3	Pembukaan Kantor Cabang
553.9.4	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.9.5	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	Pos
554.1	Pembinaan
554.1.1	Kebutuhan Fasilitas
554.1.2	Rehabilitasi / Perawatan
554.1.3	Bina Usaha / Pengawasan / Penertiban
554.1.4	Standarisasi Perangkat
554.1.5	Tanah / Bangunan
554.1.6	Filateli
554.1.7	Asosiasi
554.1.8	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.2.1	Jasa Pos
554.2.2	Jasa Titipan
554.2.3	Jasa Giro
554.2.4	Benda Pos / Perangko
554.2.5	Sampul Peringatan
554.2.6	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.3.1	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
554.3.2	Pembukaan Agen / Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.4.1	Kecelakaan

554.4.2	Sabotase
554.4.3	Penyelundupan
555	Telekomunikasi / Teknologi Informasi
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
555.2.1	Telepon
555.2.1.1	Tetap
555.2.1.2	Bergerak
555.2.1.3	IKR / G
555.2.2	Internet / USO
555.2.3	Telegram , Telex / SBB , Faximile
555.2.4	Satelit , Stasiun Bumi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan / Penertiban
555.5	Perijinan
555.6	Frekwensi dan informatika
555.6.1	Amatir radio
555.6.2	KRAP
555.6.3	Radio siaran lokal
555.6.4	Televisi siaran lokal
555.6.5	Radio konsesi lokal
555.6.6	Radio base station
555.6.7	ISPU (Internet Service Provider)
555.6.8	Warnet
555.7	Pembinaan / penertiban pengawasan
555.7.1	Wartel
555.7.2	Frekwensi radio lokal
555.8	Standarisasi perangkat telekomunikasi
555.9	Perijinan
555.9.1	Amatir radio
555.9.2	KRAP
555.9.3	Radio siaran lokal
555.9.4	Televisi siaran lokal
555.9.5	Radio konsesi lokal
555.9.6	Radio Base Station

556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.1.1	Usaha Jasa Pariwisata
556.1.1.1	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.1.1.2	Restoran dan Rumah Makan
556.1.2	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.1.3	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.3.1	Sea World
556.1.4	Usaha Sarana Pariwisata
556.1.4.1	Ijin Pariwisata
556.1.4.2	Ijin Usaha Pariwisata
556.1.4.3	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.1.4.4	Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.4.5	Ijin Usaha Sarana
556.1.5	Wisatawan
556.1.5.1	Wisatawan Nusantara
556.1.5.2	Wisatawan Mancanegara
556.1.6	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.1.6.1	Dalam Negeri
556.1.6.2	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.2.1	Status Hotel
556.2.2	Kelas Hotel
556.2.3	Tarif
556.3	Travel Service
556.3.1	Pramu Wisata
556.3.2	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.3.3	Souvenir
556.3.4	Kemudahan Wisata (Visa , Bea Cukai , Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi / Wisata
556.4.1	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.4.1.1	Wisata alam (laut, gunung, air terjun)
556.4.1.2	Taman hiburan
556.4.2	Rehabilitasi / Perawatan
556.4.3	Pengembangan Fasilitas

556.4.4	Tanah / Bangunan
556.4.5	Bina Usaha
556.4.6	Institusi
556.4.6.1	Asosiasi
556.4.6.2	Lembaga Kepariwisataaan
557	Meteorologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Penyeropongan Bintang
558	-
559	-
560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
560.1.1	Data persediaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.4.1	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.4.2	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.4.3	Pemeriksaan Dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.5.1	Permohonan Rekomendasi Passport
560.5.2	Perjanjian Kerja TKI / TKW
560.5.3	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.5.4	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.5.5	Pelatihan TKI / TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.6.1	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.6.2	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke Luar Negeri
560.6.3	Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.7.1	Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
560.7.2	Pemulangan TKI / TKW Ilegal
560.7.3	TKI / TKW Terkena Kasus Pidana
561	Pengupahan

561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
561.2	Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW
562	Penempatan Kerja
562.1	Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.1.1	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.1.2	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.1.3	Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.3.1	Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara
562.3.2	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
562.3.3	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKK/BKS)
563	Pendidikan dan Pelatihan
563.1	Pendidikan Pekerja
563.1.1	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.1.2	Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.1.3	Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.2.1	Tempat Pelatihan Kerja
563.2.2	Instruktur/Pelatihan
563.2.3	Modul/Silabus dan Bahan Praktek
563.2.4	Kurikulum dan Metode Pengajaran
563.2.5	Sertifikat
563.3	Kerja sama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
565	Perselisihan Pekerja

565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.1.1	Pengaduan Perkara Pekerja/NAKER
565.1.2	Pemeriksaan Perkara Pekerja/NAKER
565.1.3	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/NAKER
565.1.4	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
565.1.5	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
565.1.6	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/P4P)
565.1.7	Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (P4D/P4P)
565.1.8	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D/P4P)
565.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan dan Keamanan Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Pekerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.8.1	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
566.8.2	Pemasangan dan Pemakaian pesawat Uap (ketel uap)
566.8.3	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.8.4	Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
566.8.5	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam Hari (shift malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK Sepihak
567.2	PHK Masal
567.3	Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
567.4	Ijin melakukan PHK
567.5	Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK

568	Kesejahteraan Buruh
568.1	Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.1.1	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.9.1	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	MODAL
570.1	Kerjasama penanaman modal antar propinsi
570.2	Kerjasama penanaman modal antar kabupaten
571	Modal asing
572	Modal, patungan (joint venture) / penyertaan modal
573	Pasar uang dan modal
574	Saham
575	Penanaman modal / Investasi
576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER

580.1	Bank Milik Pemerintah
580.1.1	Pusat / propinsi (BRI, BNI, BANK JATENG)
580.1.2	Kabupaten/ kota (BPR, BKK, BANK PASAR)
580.1.3	Program kerja dan anggaran
580.1.4	Penyertaan modal
580.1.5	Urusan kepegawaian
580.1.6	Pembagian laba / deviden
580.1.7	Laporan berkala
580.1.8	Laporan tahunan
580.1.9	Laporan pertanggungjawaban
580.1.10	Rapat umum pemegang saham
580.1.11	Perjanjian kerja sama
580.2	Bank milik swasta
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/ Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata guna Tanah
591.5	Tanah Kritis

591.6	Riwayat Tanah
591.7	Letter C
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.1.1	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.1.2	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.1.3	Pembagian Tanah Landreform
592.1.4	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.2.1	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.2.2	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.2.3	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.2.4	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.2.5	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.2.6	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi hasil
592.3.1	Penetapan Imbangan Bagi Tanah
592.3.2	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.3.3	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.4.1	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592.4.2	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.4.3	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.1.1	Sewa Tanah
593.1.1.1	Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
593.2	Hak Milik
593.2.1	Perorangan
593.2.2	Badan Hukum

593.3	Hak Pakai
593.3.1	Perorangan
593.3.1.1	Warga Negara Indonesia
593.3.1.2	Warga Negara Asing
593.3.2	Badan Hukum
593.3.2.1	Badan Hukum Indonesia
593.3.2.2	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.3.3	Tanah Gedung - gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.4.1	Perkebunan Besar
593.4.2	Perkebunan Rakyat
593.4.3	Peternakan
593.4.4	Perikanan
593.4.5	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.5.1	Perorangan
593.5.2	Badan Hukum
593.5.3	Pantia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda (P3MB)
593.5.4	Badan Hukum Asing Belanda - PBK No.5/65
593.5.5	Pemilihan Hak (Pen Pres 4/1960)
593.6	Hak Pengolahan
593.6.1	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.6.2	Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.7.1	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembahasan Tanah
593.8.1	Pencabutan Hak
593.8.2	Pembebasan Tanah
593.8.3	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran / Pemetaan
594.1.1	Fotogrametri
594.1.2	Teristris
594.1.3	Triangulasi
594.1.4	Peralatan

594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Penjabat Pembuatan Akte Tanah
594.5	Notaris
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-Hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	Ijin Pertanahan
596.1	Ijin Lokasi
596.2	Ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Tanah Non Pertanian
596.3	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Pemda
597	-
598	-
599	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata bangunan konstruksi , industri konstruksi
602	Pra kualifikasi
602.1	Daftar rekanan mampu
602.2	Tanda daftar rekanan
602.3	Kontraktor, pemborong
602.4	Tender
603	Arsitektur
604	Bahan bangunan
604.1	Tanah dan batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan logam lainnya
604.3.1	Besi beton
604.3.2	Besi profil (konstruksi)
604.3.3	Paku
604.3.4	Alumunium Profil
604.4	Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu

604.7	Bahan penutup Atap
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya
605	Instalasi
605.1	Instalansi bangunan
605.2	Instalansi listrik
605.3	Instalansi air/sanitasi
605.4	Instalansi pengatur udara
605.5	Instalansi akustik
605.6	Instalansi cahaya/penerangan
605.7	Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
606	Konstruksi pencegahan
606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2	Terhadap gempa
606.3	Terhadap angin/udara/panas
606.4	Terhadap kegaduhan
606.5	Terhadap gas/explosive
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap radiasi atom
607	Peralatan pekerjaan umum dan ketenagaan
607.1	Alat- alat berat
608	Mobil pemadam kebakaran
609	Alat Pemadam Kebakaran
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.1.1	Bendungan
611.1.2	Tanggul
611.1.3	Pelimpahan banjir
611.1.4	Menara pengambilan
611.1.5	Pembangunan dermaga
611.1.6	Bangunhan pengambilan
611.1.7	Senderan
611.2	Bangunan DAM
611.2.1	Bendung

611.2.2	Bendung dengan pintu bilas
611.2.3	Bendung dengan pompa
611.2.4	Pengambilan bebas
611.2.5	Pengambilan beban dengan pompa
611.2.6	Sumur dengan pompa
611.2.7	Kantong lumpur
611.2.8	Silf ekstretor
611.2.9	Escope chanel
611.3	Bangunan pembawa
611.3.1	Saluran
611.3.1.1	Saluran induk
611.3.1.2	Saluran sekunder
611.3.1.3	Suplesi
611.3.1.4	Tersier
611.3.1.5	Saluran kwarter
611.3.1.6	Saluran pasangan
611.3.1.7	Saluran tertutup / terowongan
611.3.2	Bangunan
611.3.2.1	Bangunan bagi
611.3.2.2	Bangunan dan sadap
611.3.2.3	Bangunan sadap
611.3.2.4	Bangunan check
611.3.2.5	Bangunan terjun
611.3.3	Bax tersier
611.3.4	Got miring
611.3.5	Talang
611.3.6	Syphon
611.3.7	Gorong-gorong
611.3.8	Pelimpahan samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.4.1	Saluran
611.4.1.1	Saluran Pembuang induk
611.4.1.2	Saluran Pembuang sekunder
611.4.1.3	Saluran pembuang tersier
611.4.2	Bangunan

611.4.2.1	Bangunan out let
611.4.2.2	Bangunan terjun
611.4.2.3	Bangunan penahan banjir
611.4.3	Gorong-gorong pembuangan
611.4.4	Talang pembuang
611.4.5	Syphon pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.5.1	Jalan
611.5.1.1	Jalan Inspeksi
611.5.1.2	Jalan Logistik
611.5.2	Jembatan
611.5.2.1	Jembatan Inspeksi
611.5.2.2	Jembatan Hewan
611.5.3	Tangga Cuci
611.5.4	Kubangan kerbau
611.5.5	Waduk lapangan
611.5.6	Bangunan penunjang
611.5.7	Jaringan telepon
611.5.8	Stasiun Argo
611.5.9	Bangunan TPI dan pasar ikan
612	P o l d e r
612.1	Tanggul Keliling
612.1.1	Tanggul
612.1.2	Bangunan penutup sungai
612.1.3	Jembatan
612.2	Bangunan pembawa
612.2.1	Saluran
612.2.1.1	Saluran muka
612.2.1.2	Saluran pembawa induk
612.2.1.3	Saluran pembawa sekunder
612.2.1.4	Saluran stasiun pompa pemasukan
612.2.2	Bangunan bagi :
612.2.2.1	Gorong-gorong
612.2.2.2	Syphon
612.3	Bangunan pembuangan

612.3.1	Stasiun pompa pembuangan
612.3.2	Saluran
612.3.2.1	Saluran pembawa induk
612.3.2.2	Saluran pembawa sekunder
612.3.3	Pintu air pembuangan
612.3.4	Gorong-gorong pembuangan
612.3.5	Syphon pembuangan
612.4	Bangunan lainnya
612.4.1	Bangunan
612.4.1.1	Bangunan Pengukur Air
612.4.1.2	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.4.1.3	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.4.1.4	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.5	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang surut
613.1	Bangunan pembawa
613.1.1	Saluran
613.1.1.1	Saluran Pembawa Induk
613.1.1.2	Saluran Pembawa Sekunder
613.1.1.3	Saluran Pembawa Tersier
613.1.1.4	Saluran Penyimpanan Air
613.1.1.5	Bangunan pintu pemasukan
613.2	Bangunan pembuangan
613.2.1	Saluran
613.2.1.1	Saluran Pembawa Induk
613.2.1.2	Saluran Pembawa Sekunder
613.2.1.3	Saluran Pembawa Tersier
613.2.1.4	Saluran Penyimpanan Air
613.2.1.5	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.3.1	Kolom pasang
613.3.2	Saluran
613.3.2.1	Saluran Lalu Lintas
613.3.2.2	Saluran Muka
613.3.3	Bangunan

613.3.3.1	Bangunan Penangkis Kotoran
613.3.3.2	Bangunan Pengukur Muka air
613.3.3.3	Bangunan Pengukur curah Hujan
613.3.4	Jalan
613.3.5	Jembatan
614	Pengendalian sungai
614.1	Bangunan pengamanan
614.1.1	Tanggul banjir
614.1.2	Pintu Pengatur Banjir
614.1.3	Klep Pengatur Banjir
614.1.4	Tembok Pengaman Talut
614.1.5	K r i b
614.1.6	Kantung Lumpur
614.1.7	Check Dam
614.1.8	Syphon
614.2	Saluran pengaman
614.2.1	Saluran banjir
614.2.2	Saluran Drainage
614.2.3	Corepure
614.3	Bangunan lainnya
614.3.1	Warning system
614.3.2	Stasiun
614.3.2.1	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.3.2.2	Stasiun Pengukur Air
614.3.2.3	Stasiun Pengukur Cuaca
614.3.2.4	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	K r i b
615.3	Bangunan lainnya
616	Air Tanah (Danau, Waduk, Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan pembawa
616.3	Bangunan pembuangan
616.4	Bangunan lainnya

617	-
618	-
619	-
620	J A L A N
620.1	Kriteria jalan
620.1.1	Jalan desa
620.1.2	Jalan kabupaten
620.1.3	Jalan propinsi
620.1.4	Jalan nasional
621	Jalan Kota/Kabupaten
621.1	Daerah Penguasaan
621.1.1	T a n a h
621.1.2	Tanaman
621.1.3	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.2.1	Jalan Sementara
621.2.2	Kantor Proyek
621.2.3	Gedung Proyek
621.2.4	Barak Kerja
621.2.5	Laboratorium Lapangan
621.2.6	R u m a h
621.3	Badan Jalan
621.3.1	Pekerjaan tanah (earth work)
621.3.2	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.4.1	Lapisan Pondasi bawah
621.4.2	Lapisan Pondasi
621.4.3	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.5.1	Parit Tanah
621.5.2	Gorong-gorong (culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.6.1	Tanah
621.6.2	Perkerasan
621.6.3	Pasangan

621.7	M e d i u m
621.7.1	T a n a h
621.7.2	Tanaman
621.7.3	Perkerasan
621.7.4	Pasangan
621.8	Daerah sampingan
621.8.1	Tanaman
621.8.2	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan pengaman
621.9.1	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
621.9.2	Lampu Penerangan
621.9.3	Lampu Pengaturan lalu lintas
621.9.4	Patok-patok KM
621.9.5	Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
621.9.6	Rel Pengaman
621.9.7	P a g a r
621.9.8	Turap Penahan
621.9.9	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
622.1	Daerah penguasaan
622.1.1	Tanah
622.1.2	Tanaman
622.1.3	Bangunan
622.1.4	Jalan sementara
622.1.5	Jembatan sementara
622.1.6	Kantor/Gedung Proyek
622.1.7	Barak kerja
622.1.8	Laboraturium lapangan
622.1.9	Rumah
622.2	Badan jalan
622.2.1	Pekerjaan tanah (earth work)
622.2.2	stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.3.1	Lapis pondasi bawah
622.3.2	Lapis pondasi

622.3.3	Lapis permukaan
622.4	Drainage
622.4.1	Parit
622.4.2	Gorong-gorong (culvert)
622.4.3	Buku trotoir
622.4.4	Tanah
622.4.5	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.5.1	Tanah
622.5.2	Perkerasan
622.6	Medium
622.6.1	Tanah
622.6.2	Tanaman
622.6.3	Perkerasan
622.6.4	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.7.1	Tanaman
622.7.2	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.8.1	Rambu-rambu
622.8.2	Lampu penerangan
622.8.3	Lampu Pengatur lalu lintas
622.8.4	Patok-patok KM
622.8.5	Patok-patok R,O,W (sempadan)
622.8.6	Rel pengamanan
622.8.7	Pagar
622.8.8	Turap penahan
622.8.9	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-

630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota/kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.1.1	Tanah
631.1.2	Tanaman
631.1.3	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.2.1	Jalan sementara
631.2.2	Jembatan sementara
631.2.3	Kantor Proyek
631.2.4	Gedung Proyek
631.2.5	Barak kerja
631.2.6	Laboratorium lapangan
631.2.7	Rumah
631.3	Pekerjaan tanah (earth work)
631.3.1	Galian tanah
631.3.2	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.4.1	Pondasi Kepala jembatan
631.4.2	Pondasi pilar
631.4.3	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.5.1	Kepala jembatan
631.5.2	Pilar
631.5.3	Piloon
631.5.4	Landasan
631.6	Bangunan
631.6.1	Gelagar
631.6.2	Lantai
631.6.3	Perkerasan
631.6.4	Jalan orang/ trottoir
631.6.5	Sandaran
631.6.6	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.7.1	Turap / penahan

631.7.2	Bronjong
631.7.3	Strek Dam
631.7.4	Kist Dam
631.7.5	Coupute
631.7.6	Krip
631.8	Bangunan pelengkap
631.8.1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
631.8.2	Patok pengamanan
631.8.3	Patok R.O.W (sempadan)
631.9	Oprit
631.9.1	Badan
631.9.2	Perkerasan
631.9.3	Drainage
631.9.4	Baku
631.9.5	Mediun
632	Jembatan pada jalan Luar Kota
632.1	Daerah penguasaan
632.1.1	Tanah
632.1.2	Tanaman
632.1.3	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.2.1	Jalan sementara
632.2.2	Jembatan sementara
632.2.3	Kantor Proyek
632.2.4	Gedung Proyek
632.2.5	Barak kerja
632.2.6	Laboratorium lapangan
632.2.7	Rumah
632.3	Pekerjaan tanah (earth work)
632.3.1	Galian tanah
632.3.2	Timbunan Tanah
632.4	Pondasi
632.4.1	Pondasi kepala jembatan
632.4.2	Pondasi pilar
632.4.3	Pondasi angker

632.5	Bangunan bawah
632.5.1	Kepala jembatan
632.5.2	Pilar
632.5.3	Piloon
632.5.4	Landasan
632.6	Bangunan Atas
632.6.1	Gelagar
632.6.2	Lantai
632.5.3	Perkerasan
632.6.4	Jalan orang/ trotoir
632.6.5	Sandaran
632.6.6	Talang air
632.7	Bangunan pengaman
632.7.1	Turap/penahan
632.7.2	Bronjong
632.7.3	Strek Dam
632.7.4	Kist Dam
632.7.5	Coupute
632.7.6	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.8.1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.8.2	Patok pengamanan
632.8.3	Patok R.O.W (sempadan)
632.9	Oprit
632.9.1	Badan
632.9.2	Perkerasan
632.9.3	Drainage
632.9.4	Baku
632.9.5	Mediun
633	-
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-

639	-
640	BANGUNAN
640.1	Perijinan (IMB, dll)
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPRD
641.4	Gedung Setda
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
641.7	Pendopo
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan (SCJ, Showroom)
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal Angkutan Udara
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen, tugu

646.2	Benteng Portugis
646.3	Klenteng
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.1.1	Inti/ sederhana
648.1.2	Sedang /Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.2.1	Rumah contoh
648.3	Real estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.1.1	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.2.1	Penahan beban
649.2.2	Tidak menahan beban
649.3	Atap
649.4	Lantai/ langit-langit
649.4.1	Suspendend
649.4.2	Solit
649.5	Pintu/jendela
649.5.1	Pintu hermonik
649.5.2	Pintu biasa
649.5.3	Pintu sorong
649.5.4	Jendela kayu
649.5.5	Jendela sorong
649.5.6	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah perdagangan/ pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (<i>site & servei</i>)
653.1	Kepadatan Rendah (<i>low density</i>)

653.2	Kepadatan Tinggi (<i>high density</i>)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (<i>home industry</i>)
655	Daerah Rekreasi (<i>open spece</i>)
655.1	<i>Publik Garden</i>
655.2	<i>Sport & playing fields</i>
655.3	<i>Open space</i>
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan jalan
656.1.1	Penerangan jalan
656.2	Jaringan Kereta api
656.3	Jaringan sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.2.1	Bangunan
657.2.2	Bangunan Penyaring
657.2.3	Bangunan Penghancur Kotoran
657.2.4	Bangunan Pengendapan
657.2.5	Bangunan Pengering Lumpur
657.2.6	Unit Disinfektan
657.2.7	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.1.1	Bangunan pengumpulan
658.1.2	Bangunan pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.3.1	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
659	Tempat Pembuangan Akhir Sampah
660	TATA LINGKUNGAN

660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran Lingkungan
660.3.1	Pencemaran Air
660.3.2	Pencemaran Udara
660.3.3	Pencemaran Tanah
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Pengembangan Teknologi Lingkungan
665	Pengembangan Kapasitas
666	Limbah
666.1	Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
666.2	Limbah cair
666.3	Limbah padat
666.4	Limbah gas
667	Kajian Lingkungan Hidup
667.1	Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
667.1.1	Komisi Penilai AMDAL (Pusat, Daerah)
667.1.2	Tes / uji laboratorium lingkungan hidup
667.2	Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKL/ UPL)
668	Audit lingkungan
669	Program - program lingkungan hidup
669.1	Program kali bersih (Prokasih)
669.2	Program langit biru
669.3	Program bersih pantai
670	KETENAGAAN / KELISTRIKAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan

671.1.1	Perijinan
671.1.2	Rekomendasi
671.1.3	Pembinaan dan Pengawasan
671.1.4	Kelistrikan PLN
671.1.5	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit tenaga listrik
671.2.1	PLTA-Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.2.2	PLTD- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.2.3	PLTG- Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.2.4	PLTM- Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.2.5	PLTN- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.2.6	PLTN- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.2.7	PLTU- Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.3.1	Gardu Induk / gardu penghubung/ gardu trafo
671.3.2	Saluran Udara Tegangan Tinggi
671.3.3	Kabel Bawah Tanah
671.3.4	Saluran udara tegangan ekstra tinggi
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.4.1	Gardu Distribusi
671.4.2	Tegangan Menengah
671.4.3	Tegangan Rendah
671.4.4	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.5.1	Sambungan Listrik
671.5.2	Penjualan Tenaga Listrik
671.5.3	Tarif listrik
671.5.4	Gangguan Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap

679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	-
682	-
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran pembawa
691.7	Alat ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (<i>Air Rolief</i>)
692.3	Tutup penguras (<i>Blow oof</i>)
692.4	Bak pelepas tekanan
692.5	Jembatan pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan

693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.1.1	Menara
694.1.2	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.6.1	Hydran Umum
694.6.2	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.7.1	Katup Udara (<i>air relief</i>)
694.7.2	Katup pelepas (<i>blow off</i>)
694.8	Bak pelepas tekanan (<i>pressuer reducing valve</i>)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
701	Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
702	Pengawasan Peralatan
703	Pengawasan Kekayaan
704	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen / Arsip
705	Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
706	Pengawasan organisasi dan tata laksana
707	Pengawasan Penelitian / Riset
708	Pengawasan konferensi/ rapat dinas
709	Pengawasan perjalanan dinas pejabat/ PNS
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintahan Pusat
712	Pengawasan Pemerintahan Propinsi

713	Pengawasan Pemda Kabupaten/ Kota
714	Pengawasan Pemerintahan Desa
715	Pengawasan DPR/ MPR/ DPD
716	Pengawasan DPRD Propinsi
717	Pengawasan DPRD Kabupaten/ Kota
718	Pengawasan Hukum/ Konstitusi/ Peraturan Lainnya
719	Pengawasan Hubungan Luar Negeri
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai
721.1	Keanggotaan
721.2	Pendirian / Pembubaran
721.3	Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai
722	Pengawasan organisasi kemasyarakatan/ agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
723	Pengawasan organisasi profesi dan fungsional
724	Pengawasan organisasi kepemudaan/ olahraga
725	Pengawasan buruh, tani, nelayan
726	Pengawasan organisasi wanita
727	Pengawasan pemilu
727.1	Pemilu legislatif dan DPD
727.2	Pemilu eksekutif/ Presiden / Gubernur/ Bupati / Walikota
728	Pengawasan keanggotaan PNS dalam partai
729	Pengawasan pendanaan partai
730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
731	Pengawasan Pertahanan
732	Pengawasan Keamanan
733	Pengawasan Penegak Hukum
734	Pengawasan Perlindungan Masyarakat
735	Pengawasan Penyimpangan Pejabat/ PNS
735.1	Persengketaan PNS
735.2	Pembunuhan
735.3	Penganiayaan / Perampokan / Pencurian
735.4	Pemalsuan
735.5	Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual
735.6	Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural
736	Pengawasan bencana alam

737	Pengawasan SAR / Bencana
738	Pengawasan Keamanan Aparat/ Pejabat
739	Pengawasan Lingkungan Hidup
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
742.1	Kesejahteraan Guru
742.2	Fasilitas / Sarana
742.3	Mutu Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
743.1	Kebudayaan Daerah / Nasional
743.2	Kebudayaan Asing
744	Pengawasan Kesehatan / Makanan/ Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Pendistribusian
752	Pengawasan Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
753	Pengawasan Perindustrian
754	Pengawasan Pertambangan / Kelautan
755	Pengawasan Perhubungan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
757	Pengawasan PMDN/ PMA
758	Pengawasan Perbankan / Moneter
759	Pengawasan Pertahanan/ BPN
760	BIDANG PKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan

767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Peralatan
769	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota
772	Serah Terima Jabatan Publik
773	Laporan Pertanggungjawaban Pusat
774	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
775	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
776	Penolakan LPJ
777	Penyimpangan Pejabat Publik
778	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
779	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PNS
782	Pengawasan Kedudukan / Jabatan
783	Pengawasan Kesejahteraan PNS
784	Pengawasan Cuti
785	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
786	Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS
787	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Parpol
788	Persengketaan PNS , Penyimpangan pejabat/PNS
789	Pengawasan Pendidikan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran / APBD
792	Pengawasan Otorisasi
793	Pengawasan Verifikasi
794	Pengawasan Pembukuan / Akuntansi
795	Pengawasan Perbendaharaan
796	Pengawasan pembinaan Perbendaharaan
797	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak
798	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
799	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas
800	KEPEGAWAIAN Termasuk Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian

767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Peralatan
769	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota
772	Serah Terima Jabatan Publik
773	Laporan Pertanggungjawaban Pusat
774	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
775	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
776	Penolakan LPJ
777	Penyimpangan Pejabat Publik
778	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
779	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PNS
782	Pengawasan Kedudukan / Jabatan
783	Pengawasan Kesejahteraan PNS
784	Pengawasan Cuti
785	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
786	Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS
787	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Parpol
788	Persengketaan PNS , Penyimpangan pejabat/PNS
789	Pengawasan Pendidikan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran / APBD
792	Pengawasan Otorisasi
793	Pengawasan Verifikasi
794	Pengawasan Pembukuan / Akuntansi
795	Pengawasan Perbendaharaan
796	Pengawasan pembinaan Perbendaharaan
797	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak
798	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
799	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas
800	KEPEGAWAIAN Termasuk Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian

800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.2.1	Pengaduan
800.2.2	Tim
800.2.3	Statistik
800.2.4	Peraturan Perundang-undangan
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	PENGADAAN Meliputi Lamaran, pengujian Kesehatan dan pengangkatan calon pegawai.
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
813.4	Pengangkatan CPNS golongan IV
814	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas
814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan
814.2	Pengangkatan Tenaga Harian
815	Pengangkatan Tenaga Asing
816	Pengangkatan Tenaga Kontrak
816.1	Surat Perjanjian Tenaga Kontrak
817	Pengangkatan Jabatan Fungsional

818	-
819	-
820	MUTASI
820.1	Golongan I
820.2	Golongan II
820.3	Golongan III
820.4	Golongan IV
820.5	Fungsional
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.1.1	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.1.2	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.1.3	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.1.4	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
821.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.2.1	Sekjen / Dirjen / Kaban / Sekda / Asekda
821.2.2	Kepala Biro / Direktur / Inspektur / kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor
821.2.3	Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang / Inspektur Pembantu
821.2.4	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi /Kepala Sub Bidang / Pemeriksa / UPTD / UPPD
821.2.5	Wakil Gubernur
821.2.6	Wakil Bupati
821.2.7	Camat
821.2.8	Lurah
821.2.9	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan

823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh
825	Datasing dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
826.5	Ijin Belajar
826.6	Pemakaian Gelar
827	Wajib Militer (Bela Negara)
828	Mutasi Pegawai Instansi Lain
829	-
830	KEDUDUKAN
831	Perhitungan Masa Kerja
832	Penyesuaian Perangkat / Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV
833	Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
834	Penghargaan Teknologi Tepat Guna
835	Penghargaan Humas
836	Penghargaan Lingkungan Hidup
837	Penghargaan Kemanusiaan
838	Penghargaan Kewirausahaan
839	Penghargaan Kesenian

840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
840.1	Meliputi Tunjangan
841	Tunjangan
841.1	Jabatan
841.2	Kehormatan
841.3	Dana Kematian (Uang Duka)
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas Tetap / Cuti / Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Pangan, uang makan
841.8	Tambahan Penghasilan
841.9	Tunjangan cacat
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik, Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844.1	Distribusi Sandang
844.2	Distribusi Pangan
844.3	Distribusi Lainnya
845	Perumahan / Tanah
845.1	Perumahan Pegawai
845.2	Tanah Kapling
845.3	Losmen / Hotel
846	Bantuan Sosial
846.1	Bantuan Kebakaran
846.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi
848	Dispensasi
849	-

850	CUTI
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lainnya
858	-
859	-
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.4	Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
861.5	Pegawai Teladan
861.6	Penghargaan Lainnya
862	Hukuman
862.1	Tegoran / Peringatan
862.2	Penundaan Kenaikan Gaji
862.3	Penurunan Pangkat
862.4	Pemindahan
863	Konduite/ DP3
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
865.1	Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin / Ijin Cerai / Menikah lagi
866	Penilaian Kinerja
866.1	Struktural
866.2	Fungsional
867	Rehabilitasi
868	Pembinaan Disiplin Pegawai

885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
891	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
892	Pendidikan Reguler
892.1	IIP
892.2	Akademi
892.2.1	Agraria
892.2.2	Pemerintah Dalam Negeri
892.3	Kursus – Kursus Reguler
893	Pendidikan Non Reguler
893.1	Diklat
893.1.1	Kepemimpinan dan Kader (pra jabatan, kepemimpinan)
893.1.2	Teknis
893.1.3	Fungsional
893.2	Kursus – Kursus, Penataran , Bimbingan Teknis
894	Pendidikan Ke Luar Negeri
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah , symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan / Widyawisata / KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar (Widyaiswara)
897	Akademi Pendidikan
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan , meliputi pendaftaran , testing , ujian
898	Fasilitas
898.1	Tunjangan belajar / bea siswa
898.2	Asrama
898.3	Uang makan

898.4	Uang transport
898.5	Uang buku
899	Sarana
899.1	Buku
899.2	Gedung
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
902.1	DAU
902.2	AAK
903	APBD
903.1	Perubahan Anggaran
904	RKA
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan SKPD / PPKD
912	Keputusan Bupati tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA / DPPA / DPAL - SKPD / PPKD
914	Anggaran Kas
915	Surat Penyediaan Dana (SPD)
916	-
917	-
918	-
919	-
920	AKUNTANSI
921	Laporan- laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
922	-
923	-
924	-
925	-

926	-
927	-
928	-
929	-
930	PERBENDAHARAAN
931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar penguji SP2D
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
941	Bintek – bintek / kursus yang berkaitan dengan keuangan
942	-
943	-
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	PENGELOLAAN KAS DAERAH
951	Laporan pemotongan IWP , Taperum , PPh 21 dari gaji
952	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
953	Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN / PPh) dari CV / PT / Instansi
954	Surat tanda setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank

957	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
959	-
960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbendaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD
965	Edaran - edaran
966	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.1.1	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.1.2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
971.1.3	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.2.1	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi bidang seni budaya dan pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Peternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk Trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi,

	parkir, dll)
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna, dll)
974.7	Retribusi bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.1.1	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.1.2	Penjualan Rumah Jabatan /Rumah Dinas
979.1.3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
979.1.4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
979.1.5	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.1.6	Penjualan Drum Bekas
979.1.7	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.2.1	Jasa Giro Kas Daerah
979.2.2	Jasa Giro Pemegang Kas
979.2.3	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.3.1	Bunga Deposito
979.3.2	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.4.1	Sumbangan Pihak Ke Tiga

979.4.2	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.4.3	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan lain-lain
979.5.1	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.5.2	Ternak Tidak Layak Bibit
979.5.3	Sewa Internet
979.5.4	Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
979.5.5	Kerjasama Dengan BUMIDA
979.5.6	Penerimaan DUKS
979.5.7	Tempat Reaksi Karimunjawa
979.5.8	Setoran TP-TGR
979.5.9	Penerimaan Lainnya dari setda / SKPD
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	-
991	-
992	-
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

Plt. BUPATI JEPARA



IHWAN SUDRAJAT